PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT INVESTASI
PEMERINTAH

BLU SPEED



Laporan Kinerja Pusat Investasi Pemerintah 2025

Menjangkau yang belum tersentuh

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, sebagai amanat Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan PIP.

PIP berkomitmen untuk menyusun Laporan Kinerja guna menjabarkan capaian kinerja sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi PIP yang bertanggung jawab untuk mengelola pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang inklusif, prudent, dan optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

LAKIN Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2025 juga diharapkan dapat digunakan oleh segenap jajaran pejabat dan pegawai Pusat Investasi Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Februari 2026

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah,

Ditandatangani secara elektronik

Ismed Saputra

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi pemerintahan baru setelah periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, yang menandai momentum penting dalam transformasi ekonomi nasional menuju perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sebagai bagian dari ekosistem keuangan negara, setiap unit pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional tersebut, Kementerian Keuangan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum memiliki tugas strategis untuk mengelola dana pembiayaan UMKM secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, PIP telah menetapkan visi, yaitu "Menjadi Pengelola Pembiayaan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM melalui Akses Pembiayaan yang Mudah dan Terjangkau" dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Untuk mewujudkan visi tersebut, PIP menjalankan misi yang meliputi:

1. Menyediakan layanan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dana pembiayaan UMKM yang prudent, efisien dan efektif;
3. Mengembangkan teknologi informasi pendukung pembiayaan yang andal dan modern;
4. Melakukan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan kepada pelaku UMKM;
5. Mengembangkan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder untuk memperkuat ekosistem UMKM.

Dalam mendukung pencapaian prioritas nasional serta mewujudkan visi dan misi organisasi, PIP telah menyusun kegiatan prioritas dan sasaran strategis. Pada tahun 2025, ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya yang sejalan dengan Renstra DJPb dan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan kinerja PIP mencapai target yang ditetapkan dengan capaian yang sangat membanggakan. Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) PIP tahun 2025, seluruhnya telah berstatus hijau (memenuhi atau melampaui target/ekspektasi), dengan mayoritas IKU mencapai capaian di atas 100%.

Kode SS/IKU	SS / IKU	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang inklusif, prudent, dan optimal			
1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	1.470.000	2.172.146	120
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3.5	5.8	120
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100	114	114
2	Kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang optimal			
2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	100	120	120
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100	109	109
3	Pengelolaan dana pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berkelanjutan			
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	83,49%	104
3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100	112	112
3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	100	101,6	101
4	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif			
4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100	110	110
4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3,5	4,5	120
5	Pengelolaan aset yang akuntabel			
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%	0,64	120
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	108,96%	108

6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel			
6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	100
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95	100	100
7	Pengelolaan organisasi yang adaptif			
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	87	102
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern			
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100	109	109
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	100	100
NILAI KINERJA ORGANISASI		110,96		

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025, Pusat Investasi Pemerintah mendapat alokasi anggaran melalui Kegiatan 4713 (Pelaksanaan Tugas Khusus/Special Mission Pengelolaan Investasi Pemerintah). Pagu anggaran PIP tahun 2025 terdiri dari pagu awal sebesar Rp95.640.778.000 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan mengalami revisi sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp119.278.406.000 (seratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah). Rincian pagu anggaran per output/klasifikasi rincian output adalah sebagai berikut:

Peningkatan pagu anggaran setelah revisi terutama disebabkan oleh penyesuaian alokasi pada Layanan Dukungan Manajemen Internal (4713.EBA) dan Hasil Kelolaan Dana BLU (4713.UAM) untuk mengakomodasi kebutuhan operasional dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang semakin berkembang. Revisi pagu anggaran dimaksud telah melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan penganggaran yang berlaku.

PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi PIP sepanjang tahun 2025. Capaian kinerja yang sangat baik ini menunjukkan komitmen PIP dalam menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan UMKM secara profesional, prudent, dan akuntabel.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mitra penyalur, pelaku UMKM, dan seluruh pegawai PIP. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan di masa mendatang dalam rangka mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.




MELVIANA ANGGRAINI
KEMENKEU
WIBOWO SAPUTRA
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

BAB 1
PENDAHULUAN





Ismed Saputra
Direktur Utama PIP

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2017 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017, Pusat Investasi Pemerintah direvitalisasi dan difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan untuk merevitalisasi PIP, dari BLU yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembiayaan infrastruktur, menjadi koordinator pendanaan (coordinated fund) KUR skema khusus (tailor made) pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Revitalisasi PIP ini difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia yang belum terjangkau melalui skema KUR perbankan.

Ketidakterjangkauan tersebut disebabkan beberapa hal, terutama oleh keterbatasan masyarakat terhadap akses perbankan (financial inclusion) dan keterbatasan perbankan terkait pemberian pinjaman dengan plafond rendah. Hal ini mengingat besarnya risiko dan biaya operasional perbankan dalam penyediaan pinjaman dengan plafond rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2016-2017 pemerintah mengkaji skema pembiayaan dengan plafond pinjaman maksimal Rp 10 juta yang ditujukan untuk pelaku usaha dalam kategori ultra mikro yang akan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Untuk mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam UU APBN 2017 tersebut, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, melakukan penataan ulang kelembagaan PIP untuk menyesuaikan tugas dan fungsi PIP sebagai coordinated fund pembiayaan ultra mikro. Sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) pembiayaan ultra mikro, PIP akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai lembaga yang akan menyalurkan secara langsung pembiayaan kepada para pengusaha ultra mikro.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN PIP Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban PIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi DJPb dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan PIP, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja PIP.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN PIP juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

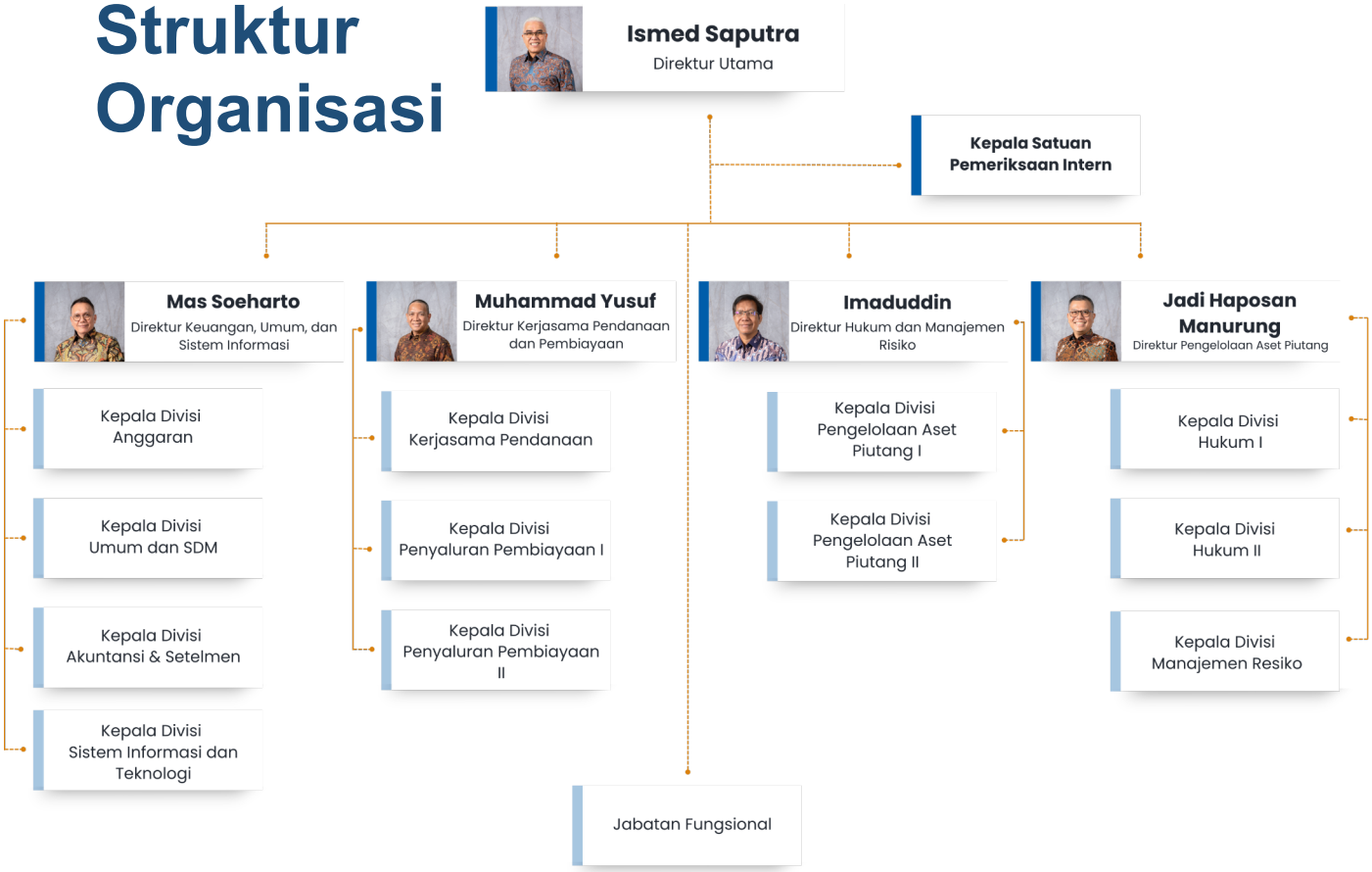
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh Direktur Utama. Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan· koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, transaksi dan pelaporan keuangan, penyelesaian (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasan dan layanan informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
b. pelaksanaan kerjasama pendanaaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
c. pelaksanaan perikatan dan monitoring Jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur; pelaksanaan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko;
d. pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah. Untuk menjamin keberlangsungan program pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.



Struktur Organisasi

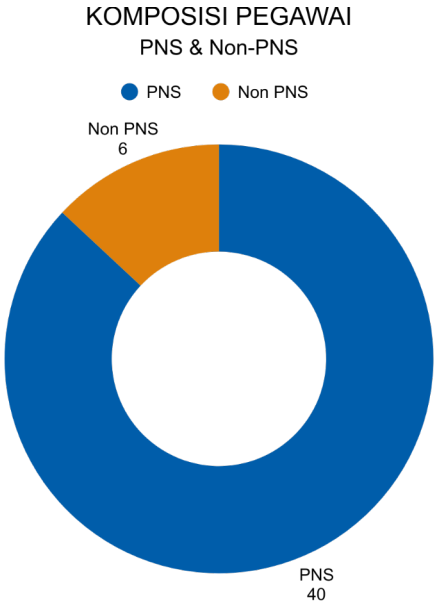


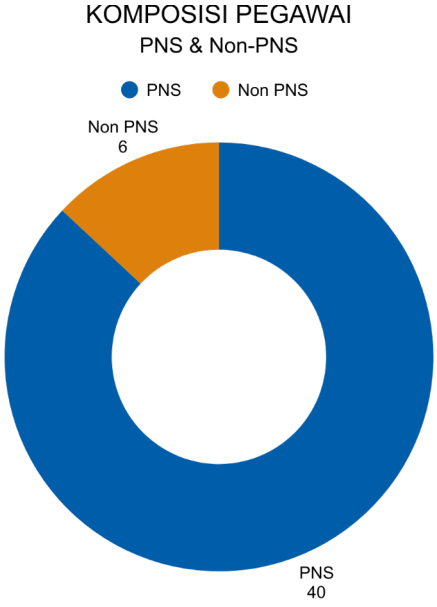
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

a. Direktur Utama,
b. Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi,
c. Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan,
d. Direktur Pengelolaan Aset Piutang,
e. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, dan
f. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.



Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset organisasi yang memiliki peran penting dalam pencapaian visi dan misi organisasi serta pemenuhan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun sebagian besar pekerjaan yang bersifat manual telah digantikan dengan Teknologi Informasi, namun SDM tetap diperlukan terutama untuk melakukan analisa mendalam terhadap permasalahan yang muncul. Susunan pejabat/pengelola Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:





Sampai dengan 31 Desember 2025, komposisi sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut

A. Pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 (empat puluh) orang, yang terdiri dari:
1) Direktur Utama sebanyak 1 (satu) orang;
2) Direktur sebanyak 4 (empat) orang;
3) Kepala Divisi sebanyak 11 (sebelas) orang;
4) Pelaksana sebanyak 24 (sembilan belas) orang.

B. Pegawai dari unsur professional (Non Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari:
1) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebanyak 1 (satu) orang;
2) Analis Keuangan/Investasi sebanyak 1 (satu) orang;
3) Kepala Divisi sebanyak 1 (satu) orang; dan
4) Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang.

Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, PIP telah mengintegrasikan pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam seluruh aspek pengelolaan data kepegawaian. Implementasi kebijakan GEDSI dalam data SDM merupakan bagian integral dari upaya PIP untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan memberdayakan seluruh pegawai tanpa memandang gender, disabilitas, atau latar belakang sosial. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia, tetapi juga mendukung pencapaian target kinerja organisasi melalui optimalisasi potensi seluruh sumber daya manusia.

C. Peran Strategis

Pusat Investasi Pemerintah melaksanakan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) yang akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (start up) UMKM.

Selain memiliki peran strategis sebagai coordinator pendanaan, Pusat Investasi Pemerintah juga berperan penting untuk mendorong kenaikan Nilai Keekonomian Debitur dan peningkatan usaha (naik kelas) dari para pelaku usaha UMKM melalui mekanisme pendampingan dan juga pelatihan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah, maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah.

Dalam rangka me-*leverage* dana yang dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah, selain menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pusat Investasi Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya. yang diharapkan dapat diterima oleh UMKM melalui skema pembiayaan UMKM melalui Pusat Investasi Pemerintah melalui LKBB adalah kecepatan dan kemudahan aksesibilitas pembiayaan serta adanya pendampingan oleh LKBB atau Lembaga yang ditunjuk.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi pada tahun 2025.

BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan penjelasan rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III
1. Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Organisasi
   Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. Realisasi Anggaran
   Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
3. Kinerja Lainnya
   Pada subbab ini diuraikan achievement Pusat Investasi Pemerintah dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik.

BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

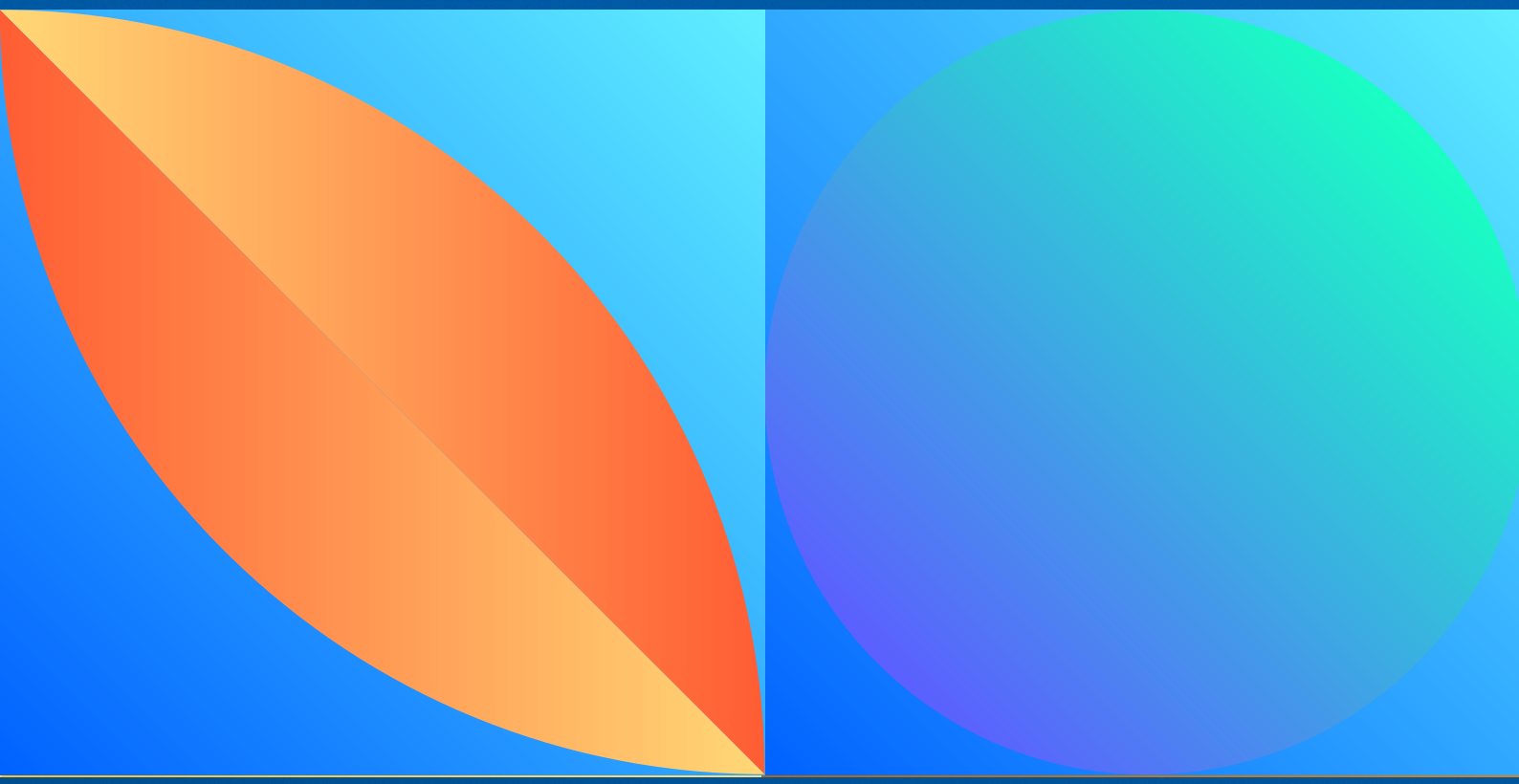
Lampiran Perjanjian Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2025.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan" dan Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tahun 2025-2029, yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia", telah disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025-2029 merupakan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada tahun 2025-2029.

Selain mendukung visi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga turut mendukung misi Kementerian Keuangan, yakni memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif dan mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan lima tujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024, yaitu;

1. Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*; dan
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Sebagai salah satu organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pusat Investasi Pemerintah turut serta dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan dan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 tersebut. Sesuai dengan definisinya, visi dapat diartikan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Pusat Investasi Pemerintah memiliki visi, yaitu "Menjadi Pengelola Pembiayaan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM melalui Akses Pembiayaan yang Mudah dan Terjangkau".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Investasi Pemerintah menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang *prudent*, efisien dan efektif;
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan Ultra Mikro yang andal, profesional dan modern;
4. Melakukan kerja sama pembiayaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya; dan
5. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan Ultra Mikro.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dibutuhkan rencana jangka panjang yang kemudian dijabarkan menjadi rencana jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Sebagai instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka Pusat Investasi Pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam melaksanakan mandat sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan untuk mendorong pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta penguatan ekosistem pembiayaan bagi usaha kecil.

Setiap kebijakan, program, dan langkah strategis yang ditempuh senantiasa dilandasi oleh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

1. Integritas

Seluruh proses pengambilan kebijakan pembiayaan UMi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola yang baik.

- Pada tahun 2025, PIP memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan dengan sistem digital yang memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas penyaluran.
- Audit internal dan kepatuhan terhadap regulasi dijalankan tanpa kompromi, memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dikelola benar-benar sampai kepada pelaku usaha ultra mikro yang berhak.

2. Profesionalisme

PIP berkomitmen menghadirkan kebijakan berbasis data, analisis mendalam, dan inovasi pembiayaan.

- Selama 2025, dilakukan penguatan data analytics untuk memetakan profil penerima pembiayaan UMi, sehingga penyaluran dapat lebih tepat sasaran dan berdaya guna.
- Kompetensi SDM terus ditingkatkan melalui pelatihan di bidang keuangan inklusif, teknologi finansial, dan manajemen risiko.

3. Sinergi

Keberhasilan program pembiayaan UMi tidak terlepas dari kerja sama dengan berbagai pihak.

- PIP menjalin kemitraan erat dengan Lembaga Penyalur, pemerintah daerah, serta ekosistem UMKM, guna memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke pelosok negeri.
- Pada 2024, PIP memperluas kolaborasi dengan platform digital dan lembaga keuangan non-bank untuk membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif.

4. Pelayanan

Orientasi PIP adalah menghadirkan layanan yang cepat, tepat dan berdampak nyata.

- Melalui penyederhanaan prosedur penyaluran pembiayaan, pelaku usaha ultra mikro tidak lagi terbebani birokrasi panjang.
- PIP menyiapkan saluran komunikasi responsif untuk menampung masukan dan keluhan, sehingga kualitas layanan terus meningkat.

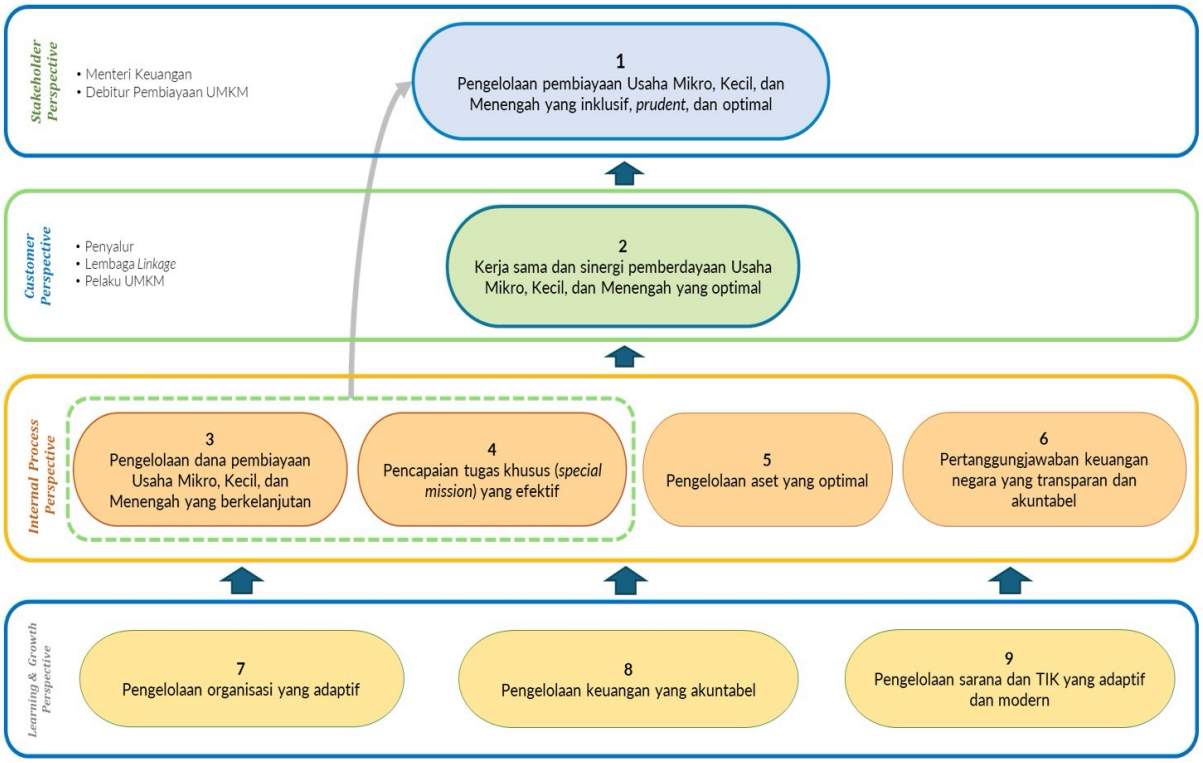
5. Kesempurnaan Setiap program dievaluasi secara berkelanjutan untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan.

- Pada tahun 2025, PIP mengembangkan inovasi skema pembiayaan baru dengan terbitnya PMK 130 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah yang mendukung usaha kecil sebagai bagian dari kontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan.
- Proses transformasi digital juga terus disempurnakan agar penyaluran pembiayaan semakin cepat, terukur, dan akurat

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Penetapa kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 dalam wujud Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Teknis, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Peta Strategi



Peta strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

- Perspektif Stakeholder

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

- Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

- Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

- Perspektif Learning and Growth

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

9 (sembilan) sasaran strategis Pusat Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Perspektif Stakeholder, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang prudent dan optimal
- Perspektif Customer, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel
- Perspektif Internal Process, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu
    1. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif,
    2. Kerja sama dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang optimal,
    3. Pengelolaan aset yang akuntabel, dan
    4. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel transparan
- Perspektif Learning and Growth, terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:
    1. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif,
    2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan
    3. Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern.

Pada tahun 2025, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) ndikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target
1	**Pengelolaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang inklusif, prudent, dan optimal**	
1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	1.470.000
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3.5
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100
2	**Kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang optimal**	
2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	100
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100
3	**Pengelolaan dana pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berkelanjutan**	
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%
3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100
3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	100
4	**Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif**	
4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100
4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3,5
5	**Pengelolaan aset yang akuntabel**	
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%
5c-N	Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	100
6	**Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**	
6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95
7	**Pengelolaan organisasi yang adaptif**	
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
8	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**	
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100
9	***Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern***	
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100

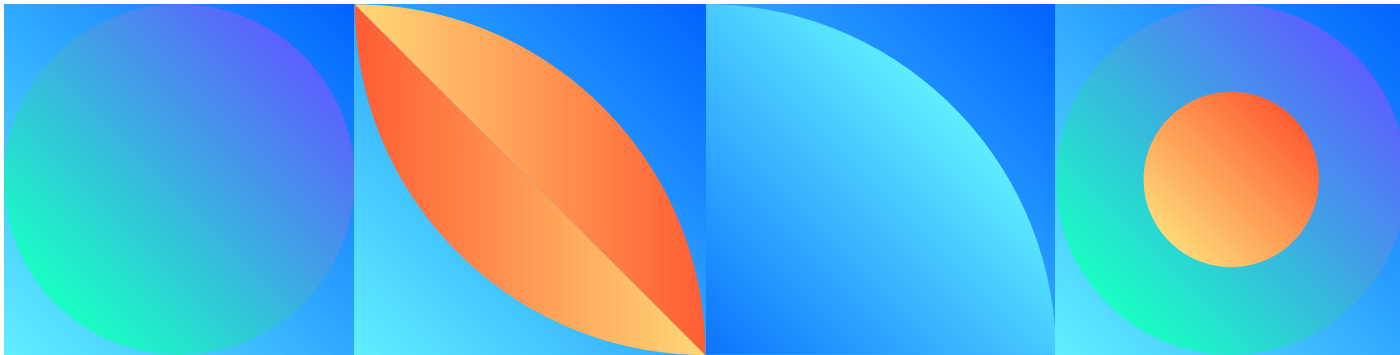
Refinement Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2025

Dalam rangka terwujudnya visi dan misi Pusat Investasi Pemerintah, dan tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, serta sebagai bentuk upaya perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement*), Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan penyempurnaan (*refinement)* pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Refinement IKU tersebut dapat berupa peningkatan target IKU, penetapan IKU baru, penghapusan IKU, dan melakukan reformulasi IKU lama.

SS/IKU	SS / IKU	Target	*Refinement*
1	**Pengelolaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang inklusif, prudent, dan optimal**		
1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	1.470.000	Penyesuaian target dari dari 2.200.000 debitur menjadi 1.470.000 debitur pada tahun 2025.
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3.5	Reformulasi perhitungan sebagai dampak implementasi PMK 130 Tahun 2024
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100	Reformulasi perhitungan IKU yaitu dengan penyesuaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB Nomor 14 tentang Pedoman Penyusunan Survei Masyarakat Unit Kepuasan Penyelenggara Pelayanan Publik, dan menambahkan unsur kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui Layer 2 HAI DJPb dalam perhitungan IKU ini.
2	**Kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang optimal**		
2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	100	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada raw data dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Pemerintah tahun 2025.
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada raw data dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025.

3	**Pengelolaan dana pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berkelanjutan**		
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada raw data dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025.
3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100	Merupakan IKU baru mandatory bagi seluruh BLU
3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	100	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada raw data dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025.
4	**Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif**		
4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang. Selain itu, target IKU sudah merupakan target tertinggi.
4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3,5	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang. Selain itu, target IKU sudah merupakan target tertinggi.
5	**Pengelolaan aset yang akuntabel**		
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan penyesuaian target, dikarenakan dinamisasi risiko yang meningkat.
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	Merupakan IKU baru yang mengukur coverage jaminan pembiayaan UMKM
5c-N	Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	100	Merupakan IKU baru yang mengukur realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur

6	**Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**		
6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang. Selain itu, target IKU sudah merupakan target tertinggi.
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
7	**Pengelolaan organisasi yang adaptif**		
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
8	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**		
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	Merupakan IKU mandatory lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
9	**Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern**		
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100	Merupakan IKU baru yang mengukur tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Selain itu, dilakukan juga perbandingan realisasi IKU dengan target pada Rencana Kerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan perbandingan antara target awal dengan capaian Pusat Investasi Pemerintah, maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 adalah sebesar 110,96. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi PIP Tahun 2025 per Perspektif

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30	118
Customer	20	115
Internal Process	25	109,47
Learning and Growth	25	100,77
Nilai Kinerja Organisasi		**110,96**

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, seluruh perspektif mendapatkan nilai di atas 100, dengan nilai tertinggi terdapat pada perspektif Stakeholder dengan nilai sebesar 118. NKO Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,46 poin jika dibandingkan dengan capaian NKO tahun sebelumnya sebesar 108,50.

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Pusat Investasi Pemerintah dari tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2021 NKO tercatat sebesar 104,22, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 97,57, dan kembali meningkat secara konsisten pada tahun 2023 (104,34), 2024 (108,50), dan 2025 (110,96). Pencapaian ini merupakan NKO tertinggi sepanjang sejarah organisasi PIP.

Pada tahun 2025 terdapat 20 IKU yang seluruhnya dapat mencapai target (berstatus hijau). Rincian capaian seluruh IKU PIP tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Capaian IKU Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	**Pengelolaan pembiayaan UMKM yang inklusif, prudent, dan optimal**			**118**
1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	1.470.000	2.172.146	120
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMKM	3,5%	5,8%	120
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100	114	114
2	**Kerja sama dan sinergi pemberdayaan UMKM yang optimal**			115
2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	100	120	120
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan UMKM	100	109	109
3	**Pengelolaan dana pembiayaan UMKM yang berkelanjutan**			105.58
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	83,49%	104
3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100	112	112
3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	100	101,6	101,6

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
4	**Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif**			115
4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100	110	110
4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3,5	4,5	120
5	**Pengelolaan aset yang akuntabel**			114.68
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%	0,64%	120
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	108,96%	108
5c-N	Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	100	120	120
6	**Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**			102.63
6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	100
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	95	100	100
7	**Pengelolaan organisasi yang adaptif**			101.18
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	87	102
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100
8	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**			100
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100
9	**Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern**			101.13
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi PIP	100	109	109
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	100	100
	NILAI KINERJA ORGANISASI			**110,96**

B. Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis dan IKU

Berikut ini disampaikan penjelasan atas capaian kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 pada setiap Sasaran Strategis dan IKU:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Pembiayaan UMKM yang Inklusif, Prudent, dan Optimal

Pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan dana bergulir pembiayaan Ultra Mikro, yang meliputi perencanaan pendanaan pembiayaan, pengelolaan dana pembiayaan, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (active cash management) untuk menjamin ketersediaan dana dalam rangka memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	**Pengelolaan pembiayaan UMKM yang inklusif, prudent, dan optimal**			118
1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	1.470.000	2.172.146	120
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMKM	3,5%	5,8%	120
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100	114	114

IKU 1a-CP: Indeks Keberhasilan Inklusi Keuangan

IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Keuangan merupakan IKU Stakeholder Perspective yang bertujuan untuk mengukur jumlah penerima yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui program pembiayaan UMi dan UMi Pro, serta mendorong perluasan penyaluran pembiayaan kepada debitur baru melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah. Program Pembiayaan UMi adalah salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang belum terlayani perbankan formal (unbankable).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.05/2024 tentang Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah, debitur pembiayaan UMKM merupakan pelaku usaha mikro yang memperoleh fasilitas pembiayaan berupa:

- Pembiayaan UMi: pembiayaan dengan baki debet (outstanding) paling banyak Rp20.000.000,00 per debitur.
- Pembiayaan UMi Pro: pembiayaan dengan baki debet (outstanding) paling banyak Rp100.000.000,00 per debitur, ditujukan bagi UMKM yang telah naik kelas.

Kedua jenis pembiayaan tersebut disalurkan melalui Penyalur berupa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan/atau Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan, disertai pendampingan, serta terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program - Ultra Mikro (SIKP-UMi).

Formula IKU: Jumlah penerima pembiayaan UMKM dihitung berdasarkan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang dari seluruh penerima pembiayaan UMi dan UMi Pro selama tahun 2025. Target jumlah penerima pembiayaan UMKM tahun 2025 sebanyak 1.470.000 debitur. Sumber data berasal dari Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP-UMi) dan Berita Acara Penyaluran. IKU ini bersifat Cascading Peta (Indirect), konsolidasi periode Take Last Known Value (TLK), dan dikelola bersama oleh Direktorat Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan serta Direktorat Pengelolaan Aset Piutang.

Realisasi IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Keuangan tahun 2025 mencapai 2.172.146 debitur dari target sebesar 1.470.000 debitur, sehingga persentase capaiannya mencapai 147,8% atau capaian IKU sebesar 120 (maksimum). Capaian triwulanan sepanjang tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Capaian IKU 1a-CP Indeks Keberhasilan Inklusi Keuangan Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	220.500	514.500	514.500	955.500	955.500	1.470.000	1.470.000	Max/TLK
Realisasi	252.412	687.840	687.840	1.262.106	1.262.106	2.172.146	2.172.146	-
Capaian	114%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	-

Perkembangan capaian jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro sejak program dimulai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Capaian Debitur Pembiayaan UMi Tahun 2017–2025

Tahun	Target Debitur	Capaian Debitur	%	Dana Kelolaan (Rp Miliar)	Penyaluran (Rp Miliar)
2017	300.000	307.033	102,3%	1.500	753
2018	500.000	557.112	111,4%	4.000	1.564
2019	600.000	809.926	135,0%	7.000	2.720
2020	800.000	1.765.974	220,7%	8.000	6.013
2021	1.800.000	1.958.224	108,8%	10.000	7.035
2022	2.000.000	2.011.171	100,6%	10.000	8.140
2023	2.100.000	2.211.468	105,3%	10.000	9.845
2024	2.200.000	2.220.859	100,9%	10.000	10.933
2025	1.470.000	2.172.146	147,8%	10.000	12.193
Total	**11.770.000**	**14.013.913**	**119%**	**10.000**	**59.196**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian debitur pembiayaan UMi secara kumulatif sejak 2017 hingga 2025 telah mencapai 14.013.913 debitur dari total target 11.770.000 debitur, atau 119% dari target kumulatif. Target tahun 2025 diturunkan menjadi 1.470.000 debitur (dibandingkan 2.200.000 pada tahun 2024) karena adanya penyesuaian kebijakan dengan diberlakukannya PMK 130/2024 yang memperluas skema menjadi UMi Pro, mengakibatkan basis target tidak lagi setara dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi tahun 2025 sebesar 2.172.146 debitur tetap melampaui target dengan capaian 147,8%. Untuk perbandingan: pada tahun 2023 realisasi mencapai 2.204.836 dari target 2.100.000 (104,9%) dan pada tahun 2024 realisasi mencapai 2.208.840 dari target 2.200.000 (100,4%) menunjukkan konsistensi kinerja PIP dalam memenuhi dan melampaui target debitur setiap tahunnya.

Sejumlah upaya extra effort yang dilakukan PIP dalam mendorong pencapaian target debitur tahun 2025, antara lain:

- Perluasan skema pembiayaan: PIP memperluas skema pembiayaan melalui produk UMi Pro dengan plafon Rp20 juta s.d. Rp100 juta per debitur sebagai pelengkap UMi, serta membuka kanal penyaluran kepada Lembaga Non Jasa Keuangan (Non LJK) selain LKBB.
- Penetapan penyalur baru: Sepanjang tahun 2025, PIP menetapkan 19 penyalur baru pembiayaan UMKM, termasuk 1 lembaga non jasa keuangan, dan menerbitkan 32 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) senilai Rp4,685 triliun.
- Penandatanganan akad UMi Pro: Merealisasikan akad pembiayaan dengan LKBB sebagai penyalur skema UMi Pro sebanyak 7 akad, membuka peluang penyaluran kepada segmen UMKM yang lebih luas.
- Pencairan pada Triwulan IV: Melakukan pencairan kepada penyalur pada triwulan IV 2025 sebesar Rp2,276 triliun dengan komposisi 81,88% pembiayaan syariah dan 18,11% pembiayaan konvensional.
- Akad baru dengan penyalur utama: Akad perjanjian pembiayaan dengan PNM sebesar Rp2 triliun (Oktober 2025), PT Pegadaian sebesar Rp250 miliar (Desember 2025), serta BAV linkage Komida dan Komida Syariah masing-masing Rp90 miliar dan Rp40 miliar.
- Sosialisasi dan e-proposal: Mengintensifkan sosialisasi dan penggalian potensi calon penyalur bekerja sama dengan Kanwil DJPb, KPPN, Pemda, dan lembaga lainnya, serta mengembangkan e-proposal dan e-pencairan untuk mempermudah proses pengajuan.
- Rakor Penyalur: Melaksanakan koordinasi intensif dengan penyalur, antara lain Rakor Penyalur 2025 di Batu, Jawa Timur.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Keberhasilan Inklusi Keuangan yang melampaui target didukung oleh beberapa faktor utama:

1. Dominasi penyalur utama berjangkauan luas. Penyalur PNM dengan komposisi 95% dari total capaian debitur menjadi penopang utama. PNM memiliki jaringan layanan lintas provinsi yang sangat luas sehingga mampu menjangkau debitur Ultra Mikro di seluruh Indonesia.
2. Pemenuhan kewajiban revolving. Capaian debitur didukung oleh pencairan yang cukup signifikan dan adanya pemenuhan kewajiban revolving atas sisa dana PIP yang masih ada di penyalur.
3. Penambahan penyalur baru. Penetapan 19 penyalur baru memberikan kontribusi tambahan jumlah debitur, meskipun belum optimal karena peraturan turunan PMK 130/2024 baru dapat diimplementasikan pada Triwulan III 2025.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- Capaian debitur masih terkonsentrasi pada PNM (95%), sehingga diversifikasi penyalur menjadi isu strategis untuk keberlanjutan program.
- Realisasi penyaluran UMi Pro belum maksimal karena peraturan pelaksanaan PMK 130/2024 baru efektif pada Triwulan III 2025.
- Persyaratan jaminan yang ketat menyebabkan berkurangnya LKBB yang dapat memenuhi ketentuan jaminan PIP seiring meningkatnya risiko NPL.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain memperluas skema pembiayaan melalui Lembaga Non LJK, mempercepat penyelesaian proposal pembiayaan, serta mendorong penambahan penyalur UMi dan UMi Pro baik LKBB maupun Non LJK.

Pembiayaan UMKM oleh PIP khususnya Pembiayaan UMi telah berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan nasional dengan memanfaatkan dana kelolaan BLU sebesar Rp10 triliun secara bergulir (revolving). Dengan total penyaluran sepanjang 2025 mencapai Rp12,193 triliun yang telah menjangkau 2.172.146 debitur, efisiensi penggunaan dana kelolaan mencapai tingkat yang optimal. Komposisi penyaluran didominasi pembiayaan syariah (81,88%) mencerminkan penyesuaian dengan karakteristik dan preferensi debitur Ultra Mikro.

Program-program yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain:

- Program Pembiayaan UMi: Program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi perbankan melalui KUR. Pembiayaan UMi berkontribusi bagi perempuan sebesar 95% dari seluruh pembiayaan PIP, dengan 40% dari skema kelompok disalurkan kepada perempuan desil 1-4.
- Program UMi Pro: Perluasan skema pembiayaan bagi UMKM yang telah naik kelas dengan plafon Rp20 juta-Rp100 juta, mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir 2025, PIP telah membiayai 103 dapur SPPG dengan lending rate maksimal 6% per tahun setara KUR.
- Pengembangan e-proposal dan e-pencairan: Inovasi digital untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan dan pencairan pembiayaan bagi calon penyalur baru.

IKU 1b-CP: Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMKM

IKU Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) Pembiayaan UMKM bertujuan mengukur dampak nyata (outcome) pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap kualitas kehidupan pribadi, kinerja usaha, dan peluang keberlanjutan usaha penerima manfaat, sekaligus mengukur manfaat sosial dan peningkatan inklusi keuangan pelaku usaha mikro.

Pengukuran NKD mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro, yang menetapkan tiga dimensi utama:

- Nilai Keekonomian Pribadi (NKP): merefleksikan perubahan kondisi kualitas hidup penerima melalui 6 indikator, yaitu pengeluaran listrik, konsumsi makanan per kapita, kualitas bangunan/lantai, kondisi sanitasi, rasio anak usia 6–15 tahun yang bersekolah, dan kebiasaan serta besaran tabungan rumah tangga.
- Nilai Keekonomian Usaha (NKU): menggambarkan kondisi kinerja dan skala usaha melalui 3 indikator, yaitu total aset usaha (di luar tanah dan bangunan), omzet tahunan usaha, dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- Nilai Keuangan Inklusif (NKI): mengukur peran pembiayaan dalam meningkatkan literasi dan akses layanan keuangan formal melalui 3 indikator, yaitu penggunaan pembukuan usaha, akses tabungan dan lembaga keuangan, dan literasi keuangan.

Formula realisasi IKU dihitung sebagai selisih persentase antara NKD debitur lama dan NKD debitur baru, dibagi NKD debitur baru. Metode survei menggunakan pendekatan komparatif cross-sectional antara kelompok debitur lama (cut-off akad hingga Juni 2025) dan debitur baru (akad mulai Agustus 2025), melalui stratified sampling berbasis provinsi.

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 mencapai 5,81% (capaian peningkatan NKD), melampaui target 3,5%, sehingga capaian IKU mencapai 120 (maksimum). Survei dilaksanakan bekerja sama dengan UKM Center (UKMC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dengan total 1.801 responden valid dari target maksimal 2.000 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia.

. Capaian IKU 1b-CP Persentase Peningkatan NKD Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	3,5%	3,5%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	5,81%	5,81%	-
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120	120	-

Hasil Survei NKD Debitur UMi Tahun 2025 per Dimensi

Dimensi NKD	Debitur Baru	Debitur Lama	Selisih (poin)	Peningkatan
Nilai Keekonomian Pribadi (NKP)	34,71	36,32	+1,61	4,64%
Nilai Keekonomian Usaha (NKU)	3,24	3,70	+0,47	14,51%
Nilai Keuangan Inklusif (NKI)	2,61	2,88	+0,27	10,34%
NKD Agregat	**40,56**	**42,91**	**+2,35**	**5,81%**

Secara agregat, NKD debitur lama tercatat sebesar 42,91, lebih tinggi dibandingkan NKD debitur baru sebesar 40,56. Selisih 2,35 poin (5,81%) ini mencerminkan bahwa debitur yang lebih lama berpartisipasi dalam program pembiayaan UMi cenderung berada pada kondisi keekonomian yang lebih baik, melampaui target peningkatan 3,5%.

Dari aspek distribusi responden, konsentrasi responden terbesar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Sumatera Utara dan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan jumlah responden terbesar di luar Pulau Jawa. Mayoritas penerima pembiayaan UMi adalah perempuan (sekitar 94%), mencerminkan ketepatan sasaran program dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha mikro.

Beberapa upaya extra effort yang dilakukan dalam pelaksanaan pengukuran dan peningkatan NKD tahun 2025:

- Penyempurnaan metodologi survei: Pengukuran NKD tahun 2025 menggunakan pendekatan komparatif cross-sectional yang lebih terstruktur, dengan penyesuaian batas waktu (cut-off) kategori debitur menggunakan median tanggal akad (Juli 2025) untuk menyeimbangkan distribusi responden antar kelompok. Survei dilaksanakan bekerja sama dengan UKM Center FEB Universitas Indonesia untuk menjamin independensi dan kualitas analisis.
- Pengumpulan data digital: Survei dilakukan melalui kuesioner daring (Google Form) yang dapat diisi langsung oleh responden atau dengan pendampingan enumerator terlatih, untuk memastikan fleksibilitas dan keterjangkauan di seluruh wilayah Indonesia.
- Dukungan unit vertikal DJPb: Pengumpulan data survei didukung oleh unit vertikal DJPb (Kanwil dan KPPN) di seluruh Indonesia untuk menjangkau responden yang tersebar di berbagai provinsi.
- Benchmarking eksternal: Dilakukan perbandingan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 sebagai pembanding eksternal, khususnya pada komponen NKP, untuk memperkaya interpretasi hasil analisis.
- Program pemberdayaan terintegrasi: Pelaksanaan berbagai program yang secara langsung mendorong peningkatan NKD, antara lain Kampung UMi, fasilitasi sertifikasi halal, kompetisi bisnis UMi Youthoreneur, program SIAPIK untuk pencatatan keuangan, dan pelatihan literasi keuangan bersama K/L mitra.

Keberhasilan pencapaian IKU ini (5,81% dari target 3,5%) didorong oleh beberapa faktor:

- Dimensi NKP (kontribusi terbesar): Peningkatan NKP sebesar 1,61 poin dari 34,71 menjadi 36,32 pada debitur lama terutama ditopang oleh perbaikan pada aspek kualitas hunian dan kemampuan menabung. Seluruh sub-indikator NKP menunjukkan nilai lebih tinggi pada debitur lama, mengindikasikan perbaikan kondisi kehidupan rumah tangga yang berkelanjutan seiring lamanya partisipasi dalam program UMi.
- Dimensi NKU (peningkatan tertinggi secara persentase): NKU meningkat dari 3,24 menjadi 3,70 (+0,47 poin atau 14,51%), terutama terkait peningkatan nilai aset usaha dan omzet, yang mencerminkan penguatan kapasitas usaha debitur lama dibandingkan debitur baru.
- Dimensi NKI (peningkatan paling gradual): NKI meningkat dari 2,61 menjadi 2,88 (+0,27 poin atau 10,34%), menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan berkembang lebih bertahap dan memerlukan intervensi yang lebih berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi:

- Metode pengukuran berbasis komparatif cross-sectional (bukan longitudinal) membatasi kemampuan isolasi dampak kausal dari program UMi terhadap perubahan NKD, karena perbedaan NKD dipahami sebagai perbedaan kondisi antarkelompok, bukan perubahan pada individu yang sama dari waktu ke waktu.
- Jumlah responden valid (1.801) sedikit di bawah target 2.000, disebabkan oleh kondisi lapangan dan penyesuaian cut-off kategori debitur, meskipun tingkat keterwakilan sampel tetap memadai.
- Peningkatan NKI yang masih relatif terbatas menunjukkan perlunya penguatan intervensi literasi dan inklusi keuangan secara lebih sistematis.

Rencana aksi ke depan sebagai alternatif solusi meliputi: (1) penerapan desain riset baseline longitudinal untuk melacak debitur yang sama pada beberapa periode waktu; (2) penajaman indikator yang lebih sensitif terhadap kondisi usaha dan ekonomi rumah tangga; (3) perluasan analisis heterogenitas berdasarkan segmen gender, sektor usaha, wilayah, dan skala usaha; (4) integrasi data survei NKD dengan data administratif pembiayaan UMi; dan (5) penguatan intervensi inklusi keuangan melalui koordinasi dengan lembaga keuangan dan mitra pendamping.

Pelaksanaan survei NKD melalui platform digital (Google Form) secara signifikan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu pengumpulan data dibandingkan survei tatap muka konvensional, sekaligus mempertahankan jangkauan yang luas ke seluruh provinsi. Kerja sama dengan UKMC FEB UI memberikan efisiensi berupa akses terhadap keahlian akademis dan metodologi riset yang andal tanpa perlu membangun kapasitas riset internal dari awal. Sinergi dengan unit vertikal DJPb (Kanwil dan KPPN) untuk pengumpulan data juga mengoptimalkan sumber daya kelembagaan yang sudah ada.

Program-program berikut terbukti berkontribusi dalam mendorong peningkatan NKD debitur UMi:

- Kampung UMi: Program pemberdayaan berbasis komunitas yang mendorong peningkatan kapasitas usaha dan jejaring sosial debitur UMi secara kolektif, berkontribusi pada peningkatan NKP dan NKU.
- Program SIAPIK dan Pelatihan Literasi Keuangan: Pelatihan pencatatan keuangan usaha berbasis aplikasi SIAPIK mendukung peningkatan dimensi NKI melalui penguatan pembukuan usaha dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
- Fasilitasi Sertifikasi Halal: Fasilitasi 796 sertifikat halal (dari target 1.000) membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai produk, berkontribusi pada peningkatan NKU debitur.
- Kompetisi Bisnis UMi Youthoreneur dan Pesta Rakyat UMi: Program yang mendorong inovasi, motivasi, dan jaringan pemasaran debitur UMi, mendukung peningkatan omzet dan kapasitas usaha.
- Stimulan Alat Usaha: Penyediaan alat usaha produktif berkontribusi langsung pada peningkatan aset usaha dan kapasitas produksi debitur, mendukung peningkatan NKU.
- UMi Innovative Credit Scoring (UMi ICS): Perluasan UMi ICS ke BPDLH dan LPMUKP mendukung perluasan akses layanan keuangan formal bagi debitur UMi, mendorong peningkatan NKI.

IKU 1c-CP: Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Pusat Investasi Pemerintah kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholder. IKU ini merupakan bagian dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPKPL), yang dalam penyelenggaraannya bekerja sama dengan lembaga/tim peneliti independen untuk menjamin independensi pengukuran.

Pada tahun 2025, IKU ini terdiri dari 5 (lima) komponen dengan bobot yang berbeda pada setiap triwulan, sebagai berikut:

- Komponen I – Survei Kepuasan Pengguna Layanan (e-SKPL): mengukur Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) melalui survei berbasis elektronik.
- Komponen II – Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK DJPb): mengukur Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) dengan target 4,00.

- Komponen III – Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL: mengukur persentase penyelesaian rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (Y-1) yang ditindaklanjuti hingga tuntas.
- Komponen IV – Survei Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat (Opsional/SKPL UE II): mengukur hasil survei kepuasan layanan direktorat dengan target 3,50.
- Komponen V – Indeks Layanan Hai DJPb: mengukur capaian layanan melalui kanal Hai DJPb dengan target 3,25.

Formula realisasi IKU dihitung sebagai penjumlahan dari (Komponen I × Bobot) + (Komponen II × Bobot) + (Komponen III × Bobot) + (Komponen IV × Bobot) + (Komponen V × Bobot), di mana bobot masing-masing komponen meningkat secara bertahap dari triwulan ke triwulan. Pada Triwulan IV 2025, bobot per komponen adalah: Komponen I (65%), Komponen II (10%), Komponen III (10%), Komponen IV (5%), dan Komponen V (10%).

Perkembangan Bobot Komponen IKU 1c-CP per Triwulan Tahun 2025

Komponen	Bobot TW I	Bobot TW II	Bobot TW III	Bobot TW IV	Target TW IV
Komponen I – e-SKPL (IKPL)	14%	34%	45%	65%	4,37
Komponen II – SKPK DJPb (IKPK)	-	-	-	10%	4,00
Komponen III – Tinjut Rekomendasi SKPL	2%	6%	10%	10%	100
Komponen IV* – SKPL UE II (Opsional)	2%	5%	5%	5%	3,50
Komponen V – Hai DJPb	2%	5%	10%	10%	3,25

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Triwulan IV tahun 2025 mencapai 114,04 (dibulatkan menjadi 114), melampaui target sebesar 100. Capaian tersebut diperoleh dari penjumlahan tertimbang seluruh komponen dengan hasil sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Bobot × Capaian
Komponen I – e-SKPL (IKPL)	65%	4,37	4,62	115	74,75
Komponen II – SKPK DJPb (IKPK)	10%	4,00	4,00	100	10,00
Komponen III – Tinjut Rekomendasi SKPL	10%	100	100	120	12,00
Komponen IV* – SKPL UE II (Opsional)	5%	3,50	3,92	112	5,60
Komponen V – Hai DJPb	10%	3,25	3,80	116,92	11,69
TOTAL REALISASI IKU					**114,04**

Capaian triwulanan IKU 1c-CP selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6c. Capaian Triwulanan IKU 1c-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	20%	50%	50%	70%	70%	114	114	-
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	114	114	-

Seluruh komponen pada Triwulan IV 2025 berhasil memenuhi atau melampaui target masing-masing: Komponen I (e-SKPL) mencapai IKPL 4,62 dari target 4,37 (capaian 115); Komponen II (SKPK) mencapai 4,00 dari target 4,00 (capaian 100); Komponen III (Tinjut Rekomendasi) terealisasi penuh 100% dengan capaian 120; Komponen IV (SKPL UE II) mencapai 3,92 dari target 3,50 (capaian 112); dan Komponen V (Hai DJPb) mencapai 3,80 dari target 3,25 (capaian 116,92).

Dibandingkan dengan target pada Renja Kemenkeu tahun 2025 sebesar 100, realisasi IKU 1c-CP sebesar 114,04 melampaui target 14,04 poin. Pencapaian ini merupakan cerminan kualitas pelayanan PIP yang dinilai sangat memuaskan oleh para pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Beberapa upaya extra effort yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Penerapan metode survei berbasis digital (e-SKPL) yang meningkatkan jangkauan, efisiensi pengumpulan data, dan akurasi penilaian kepuasan pengguna layanan.
- Penyelesaian seluruh rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (Y-1) secara tuntas dan tepat waktu (Komponen III terealisasi 100%, capaian 120).
- Pelaksanaan survei kepuasan layanan direktorat (SKPL UE II) secara opsional oleh seluruh direktorat, menghasilkan realisasi 3,92 dari target 3,50.
- Peningkatan responsivitas layanan melalui kanal Hai DJPb yang terealisasi 3,80 dari target 3,25, mencerminkan komitmen PIP dalam pelayanan prima yang mudah diakses masyarakat.
- Koordinasi dan sinergi seluruh direktorat (seluruh direktorat sebagai Unit In Charge/ UIC) dalam meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- Komponen I (e-SKPL): Transformasi digital dalam metode survei kepuasan pengguna layanan dari manual ke elektronik (e-SKPL) memberikan kemudahan akses bagi responden dan meningkatkan representativitas data. IKPL yang diperoleh sebesar 4,62 berada pada layer 5 (di atas 4,57 s.d. 4,62), sehingga capaian komponen ini mencapai 115.
- Komponen III (Tinjut Rekomendasi): Seluruh saldo rekomendasi SKPL Y-1 berhasil ditindaklanjuti hingga tuntas sebelum batas waktu pelaporan, mencerminkan komitmen PIP dalam perbaikan layanan berbasis umpan balik.
- Komponen V (Hai DJPb): Peningkatan kualitas respons dan penanganan pertanyaan/ pengaduan melalui kanal Hai DJPb mendorong capaian yang melebihi target.

Tantangan yang dihadapi: perubahan metode survei ke e-SKPL memerlukan adaptasi dari para responden dan pengelola survei, namun dapat diatasi melalui sosialisasi yang memadai. Ke depan, peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU.

Penerapan e-SKPL secara signifikan mengurangi biaya dan waktu pelaksanaan survei dibandingkan metode manual, karena proses distribusi kuesioner, pengumpulan respons, dan pengolahan data dilakukan secara digital. Sinergi antardirektorat sebagai UIC memungkinkan pengelolaan IKU ini tanpa memerlukan penambahan sumber daya khusus, melainkan memanfaatkan mekanisme koordinasi yang sudah ada.

Program-program berikut berperan penting dalam mendukung keberhasilan IKU 1c-CP:

- Program SKPKPL Kemenkeu: sebagai program induk pengukuran kepuasan layanan yang dikoordinasikan oleh Setjen Kemenkeu, memberikan standar metodologi yang konsisten dan dapat dibandingkan antar satuan kerja.
- Program Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL: implementasi rekomendasi perbaikan layanan secara sistematis berdasarkan hasil survei tahun sebelumnya, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan di tahun berjalan.
- Layanan Hai DJPb: sebagai kanal layanan publik terintegrasi di lingkungan DJPb yang memudahkan stakeholder dan pengguna layanan dalam menyampaikan pertanyaan, pengaduan, dan informasi terkait layanan PIP.
- Program peningkatan kapasitas layanan internal: pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM seluruh direktorat dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dan pengguna layanan.

Sasaran Strategis 2: Kerja Sama dan Sinergi Pemberdayaan UMKM yang Optimal

Sasaran strategis ini mencakup pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pemberdayaan UMKM secara komprehensif, meliputi pendampingan, pelatihan, dan perluasan jaringan kerja sama.

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
2	**Kerja sama dan sinergi pemberdayaan UMKM yang optimal**			115
2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	100	120	120
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan UMKM	100	109	109

IKU 2a-N: Persentase Keberhasilan Pendampingan dan Pelatihan UMKM

IKU Persentase Keberhasilan Pendampingan dan Pelatihan UMKM bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada debitur UMi serta meningkatkan kapasitas penyalur dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi debitur. IKU ini juga mengukur keberhasilan pelatihan yang memberikan dampak peningkatan peluang usaha bagi debitur.

Sesuai Manual IKU, PIP harus memastikan bahwa Penyalur telah melaksanakan pendampingan untuk debitur UMKM yang dilaporkan setiap semester ke PIP. Selain itu, PIP juga melakukan pelatihan kepada debitur dan/atau calon debitur pembiayaan UMi serta pelatihan kepada manajer atau Account Officer (AO) sebagaimana telah ditargetkan. Realisasi IKU dihitung berdasarkan formula tertimbang dari 4 (empat) komponen penilaian sebagai berikut:

Formula dan Komponen Penilaian IKU 2a-N Tahun 2025

Komponen Penilaian	Bobot	Target 2025	Nilai Hasil	Formula Komponen
A. Pelaksanaan Pendampingan oleh Penyalur	1/9 (11,11%)	50 laporan/semester	e	e = (a ÷ 50) × 100%
B. Pemberdayaan Pelaku Usaha (Debitur UMi)	1/9 (11,11%)	2.000 orang/tahun	f	f = (b ÷ 2.000) × 100%
C. Pelatihan Manajer/Account Officer Penyalur	1/9 (11,11%)	300 orang/tahun	g	g = (c ÷ 300) × 100%
D. Debitur penerima pelatihan dengan peningkatan peluang usaha	6/9 (66,67%)	60% dari debitur terlatih	h	h = d ÷ 60%
Total Realisasi IKU			**R**	**R = (1/9)e + (1/9)f + (1/9)g + (6/9)h**

Sumber data IKU ini berasal dari monitoring aplikasi SIKP UMi, Laporan Pendampingan, dan Laporan Pelatihan dari Penyalur. IKU bersifat Non-Cascading dengan tingkat kendali Moderate, tingkat validitas Proxy, pelaporan triwulanan, dan konsolidasi periode menggunakan metode Take Last Known Value (TLK). Penanggung jawab IKU adalah Direktorat Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan.

Realisasi IKU 2a-N pada Triwulan IV tahun 2025 mencapai 140% dari target 100%, sehingga capaian IKU adalah 120 (maksimum). Realisasi ini merupakan nilai take last known value dari Triwulan IV. Rincian capaian triwulanan adalah sebagai berikut:

Capaian Triwulanan IKU 2a-N Persentase Keberhasilan Pendampingan dan Pelatihan UMKM Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	24,7%	53,2%	53,2%	96,15%	96,15%	140%	140%	-
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120	120	-

Realisasi per Komponen IKU 2a-N Tahun 2025

Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Nilai Tertimbang
A. Pelaksanaan Pendampingan (laporan/semester)	50 laporan	≥ 50 laporan	1/9	≥ 11,11%
B. Pemberdayaan Pelaku Usaha (debitur UMi)	2.000 orang	3.914 orang (196%)	1/9	21,77%
C. Pelatihan Manajer/AO Penyalur	300 orang	273 orang (91%)	1/9	10,11%
D. Debitur dengan peningkatan peluang usaha	60% dari terlatih	≥ 60% terlatih	6/9	≥ 66,67%
Total Realisasi IKU 2a-N TW IV 2025				**140%**

Beberapa upaya extra effort yang secara signifikan mendorong realisasi melampaui target:

- Akselerasi pemberdayaan debitur (Komponen B): Program pemberdayaan dilaksanakan terhadap 3.914 pelaku usaha UMKM atau 196% dari target 2.000 orang. Program ini mencakup berbagai skema, yaitu Kampung UMi (pendampingan berbasis komunitas), fasilitasi sertifikasi halal self-declare (796 sertifikat dari kuota 1.000), stimulan alat usaha produktif, kompetisi bisnis UMi Youthoreneur, dan Pesta Rakyat UMi sebagai ajang pemasaran produk debitur.
- Pelatihan AO dan manajerial secara luring (Komponen C): Penyelenggaraan Program Pencatatan Keuangan SIAPIK dan Program ToT Pendamping 2025 dengan 152 peserta AO, serta Program PIP Empower dengan 216 peserta manajerial. Pelatihan luring lintas penyalur juga diselenggarakan dengan 112 SDM penyalur (dari 57 penyalur) dan 20 SDM PIP, menghasilkan realisasi 273 orang atau 91% dari target 300 orang.
- Pengukuran dampak pelatihan (Komponen D): Dilakukan pengukuran terhadap debitur yang telah menerima pelatihan untuk mengidentifikasi debitur yang mengalami peningkatan peluang usaha, dengan target minimal 60% dari peserta pelatihan. Pendekatan ini memastikan bahwa program pelatihan tidak hanya bersifat kuantitatif (jumlah peserta) tetapi juga menghasilkan dampak nyata pada perkembangan usaha.
- Dukungan pendampingan oleh Penyalur (Komponen A): Seluruh penyalur diwajibkan menyampaikan laporan pendampingan setiap semester ke PIP dengan target minimal 50 laporan per semester, memastikan debitur mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari penyalur.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan IKU 2a-N:

- Desain formula yang mendorong kualitas: Bobot Komponen D (peningkatan peluang usaha) sebesar 6/9 (66,67%) memastikan bahwa keberhasilan IKU tidak semata-mata diukur dari kuantitas peserta, melainkan dari dampak nyata pelatihan terhadap perkembangan usaha debitur. Hal ini mendorong PIP untuk merancang program pelatihan yang relevan dan aplikatif.
- Percepatan program di Triwulan IV: Akselerasi pelaksanaan program pemberdayaan dan pelatihan pada Triwulan III–IV, antara lain melalui Pesta Rakyat UMi dan pelatihan luring lintas penyalur, mendorong lonjakan realisasi dari 96,15% menjadi 140%.
- Sinergi multi-program: Pelaksanaan berbagai program secara simultan (Kampung UMi, sertifikasi halal, stimulan alat usaha, pelatihan SIAPIK) memungkinkan debitur mendapatkan manfaat yang komprehensif, tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga dari aspek kapasitas usaha dan akses pasar.

Tantangan yang dihadapi:

- Dampak kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun 2025 menyebabkan penundaan pelaksanaan beberapa program pelatihan luring pada Triwulan I–II. Hal ini mendorong akumulasi pelaksanaan program pada Triwulan III–IV.

- Realisasi Komponen C (pelatihan AO/ manajer) sebesar 273 orang dari target 300 orang (91%) belum sepenuhnya terpenuhi, yang perlu menjadi perhatian untuk perencanaan tahun berikutnya.
- Kuota sertifikasi halal yang terealisasi 796 dari 1.000 (80%) menunjukkan masih ada ruang peningkatan, terutama terkait kesiapan debitur dalam memenuhi persyaratan administrasi halal.

Rencana aksi ke depan: peningkatan target peserta pelatihan AO dan manajer, perluasan program Kampung UMi ke provinsi-provinsi dengan konsentrasi debitur tinggi, serta penyesuaian skema kerja sama mitra pelaksana untuk mengantisipasi dampak kebijakan efisiensi anggaran.

IKU 2a-N mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi. Program pelatihan luring lintas penyalur dengan model transfer knowledge kepada 112 SDM penyalur dari 57 penyalur sekaligus memberikan efek pengganda (multiplier effect), karena setiap AO yang terlatih dapat meneruskan pengetahuan kepada ratusan debitur binaan masing-masing. Program Kampung UMi yang berbasis komunitas juga mengoptimalkan sumber daya dengan menyentuh banyak debitur melalui pendekatan kelompok yang lebih efisien dibandingkan pendampingan individual.

Program-program berikut berkontribusi langsung dalam pencapaian keempat komponen IKU 2a-N:

- Kampung UMi: Program pendampingan berbasis komunitas yang memfasilitasi debitur UMi dalam kelompok usaha, mendorong peningkatan Komponen B (pemberdayaan pelaku usaha) dan Komponen D (peningkatan peluang usaha). Program ini memungkinkan debitur saling berbagi pengetahuan dan mendukung pertumbuhan usaha secara kolektif.
- Program SIAPIK (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan): Pelatihan pencatatan keuangan berbasis aplikasi SIAPIK bagi AO penyalur (Komponen C) dan debitur secara langsung meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, mendukung peningkatan peluang usaha (Komponen D).
- Fasilitasi Sertifikasi Halal: Pendampingan proses sertifikasi halal self-declare kepada 796 debitur berkontribusi pada Komponen B (pemberdayaan) dan Komponen D, karena sertifikasi halal membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk debitur.
- UMi Youthoreneur dan Pesta Rakyat UMi: Program kompetisi bisnis dan pameran produk debitur UMi yang berkontribusi pada Komponen B melalui pendampingan pemasaran dan pengembangan usaha, serta mendukung Komponen D dengan mengekspos debitur pada peluang usaha baru.
- Program ToT (Training of Trainers) Pendamping: Pelatihan pelatih bagi AO penyalur (Komponen C) menghasilkan multiplier effect karena setiap AO yang terlatih mampu mendampingi lebih banyak debitur secara lebih efektif, mendukung Komponen A (laporan pendampingan) dan Komponen D.

IKU 2b-N: Persentase Perluasan Kerja Sama dan Sinergi Pemberdayaan UMKM

IKU Persentase Perluasan Kerja Sama dan Sinergi Pemberdayaan UMKM merupakan IKU Customer Perspective yang bertujuan mendorong kolaborasi dan sinergi dalam program Pembiayaan UMKM agar pembiayaan dapat menjangkau semakin luas pelaku usaha ultra mikro, baik melalui kerja sama pendanaan/program dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain, maupun melalui kerja sama penyaluran dengan LKBB/LKM.

Sesuai PMK Nomor 130/PMK.05/2024 tentang Pembiayaan UMKM pada PIP, dalam melaksanakan pembiayaan UMKM, BLU PIP dapat melakukan dua jenis kerja sama:

- Kerja sama dengan Pemerintah Daerah/ Pihak Lain: kerja sama dalam kerangka perluasan dan peningkatan dampak program pembiayaan UMKM, mencakup sinergi program, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai fiscal tools yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga.
- Kerja sama dengan LKBB/LKM/Lembaga Non LJK sebagai Penyalur: kerja sama penyaluran pembiayaan UMKM kepada pelaku usaha ultra mikro.

Formula IKU: Realisasi dihitung berdasarkan tiga komponen tertimbang, yaitu: (1) progres penyelesaian Perjanjian Kerja Sama Pendanaan (target 10 PKS/tahun) dengan bobot 50%; (2) jumlah LKBB/LKM baru yang berhasil dijajaki dan ditetapkan sebagai penyalur (target 800 lembaga) dengan bobot 25%; dan (3) jumlah manajer/AO yang mendapatkan pelatihan (target 300 orang) dengan bobot 25%. Nilai total = (0,5 × komponen 1) + (0,25 × komponen 2) + (0,25 × komponen 3). Sumber data berasal dari dokumen PKS, Keputusan Direktur Utama PIP, dan tahapan penjajakan kerja sama. IKU bersifat Non-Cascading, pelaporan semesteran, dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLK).

Formula dan Komponen Penilaian IKU 2b-N Tahun 2025

Komponen Penilaian	Bobot	Target 2025	Realisasi TW IV 2025	Formula / Nilai Hasil
1. Perjanjian Kerja Sama Pendanaan (PKS) Pemda/Pihak Lain	50%	10 PKS	16 PKS (160%)	Min(160%, 120%) × 0,50 = 0,50
2. Penambahan Penyalur Baru (LKBB/LKM)	25%	800 penyalur	913 penyalur (114,1%)	(913÷800) × 0,25 = 0,2854
3. Pelatihan Manajer/AO Penyalur	25%	300 orang	326 orang (108,7%)	(326÷300) × 0,25 = 0,2717
Total Realisasi IKU 2b-N (Tahunan 2025)				**105,70% → Capaian 109**

Realisasi IKU 2b-N pada tahun 2025 mencapai 109% dari target 100%, dengan capaian IKU sebesar 109. IKU ini menggunakan pelaporan semesteran sehingga pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester II (Tahunan). Rincian capaian:

Capaian IKU 2b-N Persentase Perluasan Kerja Sama dan Sinergi Pemberdayaan UMKM Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	24,7%	59%	59%	80%	80%	109%	109%	-
Capaian	120%	120%	120%	114,3%	114,3%	109	109	-

- Komponen 1 – Kerja Sama Pendanaan/Program (Bobot 50%): Dari target 10 PKS tahun 2025, PIP berhasil menandatangani 16 PKS dengan berbagai pihak, yaitu KemenPPPA, KemenUMKM, BPJPH, Badan Gizi Nasional (BGN), Pemkab Mamuju, Bank BJB, LP3H Salman, Yayasan Wadhwani, LP3H UIN Sunan Gunung Djati, Pemkot Pekalongan, Kementan, Pemkot Manado, Kemenko Ekonomi, Pemkot Batu, Pemkab Garut, dan Pemkab Badung. Selain itu, PIP juga menjalin kerja sama dengan BPDLH dan LPMUKP untuk penggunaan UMi Innovative Credit Scoring (UMi ICS), serta dua PKS riset dengan Prosfera (Australia) dan FEB UGM.
- Komponen 2 – Penambahan Penyalur Baru (Bobot 25%): Tercatat 913 penyalur aktif dari target 800, yang berarti terdapat penambahan neto penyalur baru yang signifikan. Sepanjang 2025, PIP menetapkan 19 penyalur baru termasuk 1 lembaga non jasa keuangan, dan menerbitkan 32 SP3 senilai Rp4,685 triliun. PIP juga merealisasikan 7 akad UMi Pro dengan penyalur.
- Komponen 3 – Pelatihan Manajer/AO Penyalur (Bobot 25%): Sebanyak 326 manajer/AO penyalur mendapatkan pelatihan dari target 300 orang, atau 108,7% dari target. Pelatihan meliputi Program SIAPIK, ToT Pendamping, dan Program PIP Empower.

Tantangan utama adalah proses pembahasan kerja sama dengan Pemda yang memerlukan waktu yang tidak terprediksikan dan bergantung pada proses birokrasi daerah masing-masing. Rencana aksi ke depan adalah mempercepat proses pembahasan PKS, memperluas penggunaan UMi ICS kepada lembaga penyalur UMKM, dan mendorong integrasi sinergi fiskal lebih lanjut dengan K/L.

Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM yang Berkelanjutan

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
3	**Pengelolaan dana pembiayaan UMKM yang berkelanjutan**			
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	83,49%	104
3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100	112	112
3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	100	101,6	101,6

IKU 3a-CP: Penggunaan Dana Kelolaan untuk Penyaluran Dana Bergulir

IKU Penggunaan Dana Kelolaan untuk Penyaluran Dana Bergulir merupakan IKU Internal Process Perspective yang bertujuan mengukur optimalisasi penggunaan dana kelolaan yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir dan menghindari saldo dana kelolaan yang idle, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana kelolaan untuk penyaluran tahun berikutnya.

Dasar hukum IKU ini adalah: (1) PMK Nomor 129/PMK.05/2020 jo. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan BLU, yang mendefinisikan Dana Kelolaan sebagai dana yang dikelola oleh BLU bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah; dan (2) PMK Nomor 168/PMK.06/2018 jo. PMK Nomor 158/PMK.06/2021, yang mendefinisikan Dana Bergulir sebagai dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh BLU guna meningkatkan ekonomi rakyat.

Formula IKU:

Penggunaan Dana Kelolaan = Nilai Penggunaan Dana Kelolaan (Investasi Non Permanen BLU) ÷ Total Dana Kelolaan BLU × 100%. Nilai outstanding penggunaan Dana Kelolaan tercermin dari nilai Investasi Non Permanen BLU pada Neraca dan Laporan Keuangan. Target tahun 2025 sebesar 80% dari total Dana Kelolaan BLU PIP (Rp10 triliun). Sumber data: Neraca dan Laporan Keuangan BLU PIP. IKU ini bersifat Cascading Peta (Indirect), konsolidasi periode Take Last Known Value (TLK), Polarisasi Maximize, dikelola oleh Direktorat Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan.

Realisasi IKU 3a-CP pada tahun 2025 mencapai 83,49% dari target 80%, dengan capaian 104,36. Nilai outstanding pembiayaan (Investasi Non Permanen BLU) sampai akhir Triwulan IV mencapai Rp8,35 triliun dari total dana kelolaan Rp10 triliun. Untuk perbandingan historis: pada tahun 2023 realisasi mencapai 80,2% dari target 80% (capaian 100,25%) dan pada tahun 2024 realisasi mencapai 83,99% dari target 80% (capaian 104,99%), menunjukkan tren peningkatan penggunaan dana kelolaan yang konsisten. Rincian capaian triwulanan tahun 2025:

Capaian IKU 3a-CP Penggunaan Dana Kelolaan Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75%	76,5%	76,5%	78%	78%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	73,7%	76,75%	76,75%	72%	72%	83,49%	83,49%	-
Capaian	98,29%	100,32%	100,32%	92%	92%	104,36%	104,36%	-

Keberhasilan pencapaian IKU di akhir tahun didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (a) akad tambahan pembiayaan baru dari PT PNM sebesar Rp2 triliun, PT Pegadaian sebesar Rp250 miliar, Komida dan Komida Syariah melalui linkage BAV, serta pencairan tahap II BMT BU Jatim; dan (b) monitoring aktif dan pendampingan bagi penyalur existing yang mengajukan top up pembiayaan. Tantangan utama adalah nilai outstanding yang bersifat dinamis, dipengaruhi oleh jumlah pencairan dari PIP ke penyalur dan pembayaran angsuran pokok dari penyalur ke PIP.

IKU 3b-CP: Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas

1. Narasi IKU

IKU Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas merupakan IKU Internal Process Perspective (Sasaran Strategis Pencapaian Tugas Khusus/Special Mission yang Efektif) yang bertujuan mengukur imbal hasil yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan dana BLU Pusat Investasi Pemerintah. IKU ini merupakan IKU baru tanpa data historis, dengan Cascading Peta (Indirect) dan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLK).

Kementerian Keuangan memiliki Special Mission Vehicle (SMV) berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana yang diberikan kewenangan untuk berinvestasi baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai penugasan masing-masing. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui imbal hasil yang diperoleh pemerintah dari berbagai investasi yang dilakukan oleh BLU Pengelola Dana —dalam hal ini mencakup LPDP, LMAN, LDKPI, BPDP, PIP, dan BPDLH.

Formula umum IKU (berlaku untuk seluruh BLU Pengelola Dana) adalah sebagai berikut:

Realisasi IKU = %Proporsi Inv. Jk. Pjg. × {ROI Jk. Pjg. ÷ (avg SUN Benchmark 5yrs + 0,15%)} + %Proporsi Inv. Jk. Pdk. × {ROI Jk. Pdk. ÷ (avg BI Rate + 0,50%)}

Khusus untuk Pusat Investasi Pemerintah, seluruh portofolio investasi merupakan investasi jangka pendek. Dengan demikian, %Proporsi Inv. Jk. Pjg. = 0% dan %Proporsi Inv. Jk. Pdk. = 100%, sehingga formula PIP menyederhanakan menjadi:

Realisasi IKU PIP = ROI Jk. Pdk. ÷ (avg BI Rate + 0,50%)

Pengukuran menggunakan accrual basis dan dilakukan secara Take Last Known Value (TLK). Realisasi IKU diukur per triwulan, dengan target ditetapkan sebesar 100% pada setiap periode pelaporan (TW I s.d. TW IV tahun 2025). Artinya, PIP dinyatakan memenuhi target apabila ROI aktual dari pembiayaan jangka pendek setidaknya sama dengan atau melebihi benchmark (avg BI Rate + 0,50%). Sumber data berasal dari Portofolio Investasi BLU, dengan unit penanggung jawab Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana dan unit penyedia data Direktorat Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi.

2. Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi IKU Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas tahun 2025 mencapai 112 dari target 100, dengan capaian 112. Rincian capaian triwulanan:

Capaian IKU 3b-CP Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	113,18%	113,18%	103,2	103,2	112	112	-
Capaian	100	113,18	113,18	103,2	103,2	112	112	-

Pencapaian IKU di atas target didukung oleh pengelolaan aktif dana kelolaan melalui active cash management, optimalisasi idle cash, serta monitoring pembayaran pokok dan bunga/nisbah kepada penyalur yang dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Selain itu, pencairan dana kepada penyalur yang signifikan sepanjang Tahun 2025.



IKU 3c-N: Persentase Realisasi PNBP Layanan Utama BLU

1. Narasi IKU

IKU Persentase Realisasi PNBP Layanan Utama BLU merupakan IKU Internal Process Perspective yang bertujuan mendorong BLU Pusat Investasi Pemerintah mengoptimalkan penyaluran sumber pendapatan dengan meningkatkan penyaluran dana kelolaan kepada masyarakat.

Realisasi PNBP BLU PIP mencakup dua jenis: (1) Pendapatan Layanan (PNBP Layanan Utama): PNBP yang diperoleh sebagai imbal jasa atas pelaksanaan layanan pembiayaan dana bergulir UMi dalam bentuk pendapatan tarif layanan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan; dan (2) Pendapatan Non-Layanan.

Formula IKU: Realisasi PNBP dari pendapatan layanan ÷ Target PNBP dari pendapatan layanan × 100%. Target PNBP dari pendapatan layanan tahun 2025 sebesar Rp280.000.000.000,00 (Rp280 miliar).

TAHUN	TARGET (MILIAR)	REALISASI (MILIAR)	CAPAIAN (%)
2023	Rp260,00	Rp242,44	**93,2%**
2024	Rp260,00	Rp296,40	**114,0%**
2025	Rp260,00	Rp284,63	**101,6%**

2. Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi PNBP Layanan Utama BLU PIP sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp284.632.759.766 atau mencapai 101,6% dari target Rp280 miliar (capaian IKU 101,6). Dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp296,40 miliar (114% dari target), realisasi tahun 2025 sedikit lebih rendah namun tetap melampaui target.

Capaian IKU 3c-N Persentase Realisasi PNBP Layanan Utama BLU Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	17,5%	40%	40%	67,5%	67,5%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	29,38%	57,4%	57,4%	70,82%	77,15%	101,6%	101,6%	-
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	101,6%	101,6%	-

Realisasi PNBP layanan utama didominasi dari LKBB afiliasi pemerintah (PNM dan BAV). Faktor yang mempengaruhi realisasi PNBP antara lain nilai outstanding pembiayaan di penyalur, tarif layanan yang dikenakan PIP kepada penyalur, dan kelancaran pembayaran bunga/nisbah dari penyalur ke PIP. Upaya yang dilakukan meliputi monitoring pembayaran pokok dan bunga secara aktif, mendorong penyalur mencairkan dana tepat waktu, serta koordinasi Direktorat Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan dengan Direktorat Keuangan Umum dan Sistem Informasi untuk monitoring proyeksi PNBP layanan utama.

Sasaran Strategis 4: Pencapaian Tugas Khusus (Special Mission) yang Efektif

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
4	**Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif**			115
4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100	110	110
4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3,5	4,5	120

IKU 4a-CP: Indeks Maturitas Tata Kelola BLU

IKU Indeks Maturitas Tata Kelola BLU merupakan turunan (cascading indirect) dari "Indeks Maturitas Tata Kelola SMV" pada level Kemenkeu-Wide (Perspektif Internal Business Process, Sasaran Strategis Pemenuhan Pengelolaan SMV dan Dukungan Sekretariat Komite yang Optimal). IKU ini bertujuan mengukur tingkat Good Corporate Governance (GCG) dan kematangan organisasi BLU PIP serta tindak lanjut hasil penilaian GCG dalam menjalankan mandatnya secara optimal.

IKU ini mencakup tiga komponen pengukuran dengan formula dan bobot yang berbeda per triwulan:

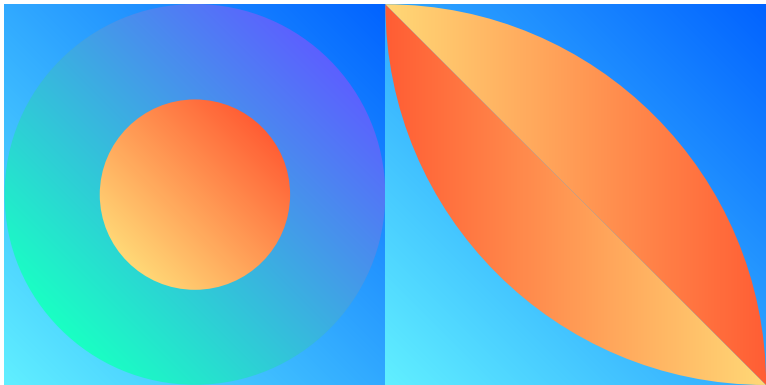
- Komponen 1 – Indeks Peningkatan Nilai Maturitas (Tingkat Maturitas): penilaian mandiri (self-assessment) tingkat kedewasaan/kematangan manajemen BLU dalam mengelola organisasi, mengacu pada PER-11/PB/2021. Penilaian dilakukan satu kali per tahun melalui Aplikasi BIOS, kemudian diverifikasi Kanwil DJPb. Indeks capaian dihitung sebagai: Indeks Kenaikan ÷ Target Indeks × 100%. Target kenaikan tahun 2025 untuk PIP adalah 3 (skala peningkatan), dengan realisasi indeks absolut 4,29 (naik 0,38 dari 3,91 di tahun 2024).
- Komponen 2 – Indeks Tindak Lanjut Rekomendasi TKPMR: persentase penyelesaian rekomendasi dari Inspektorat Jenderal terkait penerapan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR). Formula: Rekomendasi Selesai ÷ ΣRekomendasi × 100%. Terdapat sistem insentif atas ketepatan penyelesaian: selesai di TW I → indeks 120, TW II → 115, TW III → 110, TW IV → 100. Jika belum selesai: 0.
- Komponen 3 – Tingkat Pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU: mengukur persentase realisasi penggunaan Saldo Kas BLU untuk menambah Dana Kelolaan melalui Investasi Pemerintah sesuai PMK 172/PMK.05/2021. IKU ini berbasis tahapan bertingkat dengan output yang harus dicapai per triwulan: TW I – Kajian kebutuhan penambahan (20%); TW II – RBA yang mencantumkan perencanaan kebutuhan (30%); TW III – Permohonan alokasi anggaran dari KPA BUN ke PPA BUN (20%); TW IV – KMK penetapan besaran alokasi dan perintah pemindahan Saldo Kas BLU (30%); plus pengesahan pemindahan dana melalui KPPN (20%).

Formula IKU 4a-CP per triwulan:

- TW I: (Indeks Tindak Lanjut TKPMR × 80%) + (Tingkat Pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU × 20%)
- TW II s.d. TW IV: (Indeks Peningkatan Nilai Maturitas × 40%) + (Indeks Tindak Lanjut TKPMR × 40%) + (Tingkat Pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU × 20%)

Konsolidasi periode menggunakan Average. IKU bersifat Cascading Peta (Indirect), Tingkat Kendali Moderate, dengan unit penanggung jawab DJPb, DJKN, DJPPR, Setjen, dan BPPK; data bersumber dari Laporan Hasil GCG dan tindak lanjutnya serta Laporan Risk Maturity.

Tingkat Maturitas BLU Investasi Pemerintah berdasarkan hasil self-assessment yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Utama PIP Nomor ND-111/IP/2025 tanggal 10 Juni 2025 adalah 4,29. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,91, capaian tahun 2025 meningkat 0,38 poin. Hasil verifikasi oleh Kanwil DJPb pada Aplikasi BIOS mengkonfirmasi nilai 4,29—sesuai dengan self-assessment internal. Penilaian Direktorat PPKBLU melalui aplikasi BIOS menghasilkan nilai 4,00.



Rincian Tingkat Maturitas BLU PIP per Aspek Tahun 2025

Aspek	Nilai Self-Assessment	Nilai dari Kanwil DJPb	Nilai dari Dit PPKBLU
Keuangan	4	4	4
Pelayanan	4,5	4,5	4,5
Kapabilitas Internal	4,25	4,25	4,0
Tata Kelola dan Kepemimpinan	4,5	4,5	4,0
Inovasi	3,50	3,50	3,25
Lingkungan	4	4	3
Tingkat Maturitas	**4,29**	**4,29**	**4,00**

Realisasi Komponen IKU 4a-CP Indeks Maturitas Tata Kelola BLU PIP Tahun 2025

Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Capaian
Peningkatan Nilai Maturitas	3 (indeks kenaikan)	5 (4,29 → kenaikan 0,38, melebihi target)	40%	48%
Tindak Lanjut Rekomendasi TKPMR	100	115 (selesai di TW III)	40%	46%
Reformasi Tata Kelola BLU (Penambahan Dana dari Saldo Kas)	100%	80% (s.d. TW III: Permohonan alokasi ke PPA BUN)	20%	16%
Realisasi IKU	**100**	**110%**	**100%**	**110%**

Realisasi IKU 4a-CP sebesar 110% diperoleh dari: (48% × komponen maturitas) + (46% × komponen TKPMR) + (16% × komponen reformasi tata kelola) = 110%, dengan capaian IKU sebesar 110 (dari target 100). Meskipun komponen Reformasi Tata Kelola BLU hanya terealisasi 80% (tidak mencapai target 100%), komponen Peningkatan Maturitas dan Tindak Lanjut TKPMR yang masing-masing melampaui target dengan signifikan mampu mengkompensasi kekurangan tersebut sehingga realisasi keseluruhan tetap di atas target.

Capaian IKU 4a-CP Indeks Maturitas Tata Kelola BLU Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Avg
Realisasi	-	167%	167%	167%	167%	110%	110%	-
Capaian	-	120	120	120	120	110	110	-

3. Upaya Extra Effort dalam Pencapaian Target

Sejumlah upaya extra effort yang dilakukan PIP dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- Penunjukan Person In Charge (PIC) melalui Keputusan Direktur Utama PIP Nomor KEP-26/IP/2025 tentang Penunjukan PIC Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) BLU PIP, untuk memastikan akuntabilitas pemenuhan setiap aspek maturitas.
- Koordinasi intensif antar direktorat untuk pemenuhan aktivitas dan dokumen yang diperlukan dalam self-assessment tingkat maturitas.
- Penyampaian self-assessment melalui Aplikasi BIOS dan Nota Dinas Direktur Utama PIP No.ND-111/IP/2025 tanggal 10 Juni 2025, yang hasilnya diverifikasi dan dikonfirmasi oleh Kanwil DJPb.
- Pengajuan permohonan penambahan Dana Kelolaan dari Saldo Kas: PIP menyampaikan permohonan penambahan Dana Kelolaan sebesar Rp1 triliun (ND-239/IP/2025) dan telah mengajukan permohonan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan

BUN kepada DJKN cq. Dit. KND pada TW III 2025 sesuai PMK 172/PMK.05/2021.

- Penyelesaian 2 rekomendasi TKPMR: kedua rekomendasi Inspektorat Jenderal (Area of Improvement hasil penjaminan kualitas TKPMR) diselesaikan pada TW I dan TW III 2025 masing-masing, sehingga mendapatkan indeks tindak lanjut sebesar 115 (skala insentif untuk penyelesaian di TW III).

Komponen Peningkatan Nilai Maturitas (capaian 48% dari target 40%): Tingkat maturitas BLU PIP sebesar 4,29 mencerminkan peningkatan yang signifikan dibandingkan 3,91 tahun 2024. Pencapaian nilai maturitas yang tinggi pada aspek Pelayanan (4,5), Tata Kelola dan Kepemimpinan (4,5), serta Keuangan (4,0) menjadi penopang utama. Nilai maturitas verifikasi Kanwil DJPb (4,29) sesuai dengan self-assessment, menunjukkan konsistensi penilaian internal. Perbedaan dengan penilaian Direktorat PPKBLU (4,00) terutama pada aspek Kapabilitas Internal (4,25 vs 4,0) dan Tata Kelola (4,5 vs 4,0) memerlukan penyesuaian persepsi yang sedang diupayakan melalui koordinasi bilateral.

Komponen Tindak Lanjut TKPMR (capaian 46% dari target 40%): Dua rekomendasi Area of Improvement dari Inspektorat Jenderal (sesuai ND-869/IJ.4/2024 dan ND-955/PB.1/2025) berhasil diselesaikan seluruhnya. Rekomendasi pertama terkait penetapan risiko residual harapan untuk downside risk diselesaikan pada TW I; rekomendasi kedua terkait mekanisme pemberian penghargaan manajemen risiko diselesaikan pada TW III, menghasilkan indeks 115 (insentif penyelesaian TW III).

Komponen Reformasi Tata Kelola BLU (capaian 16% dari target 20%): Realisasi komponen ini hanya mencapai 80% karena proses belum tuntas sampai dengan penerbitan KMK. Tahapan yang telah diselesaikan: TW I–Kajian kebutuhan (20%) dan TW II–RBA (30%) dan TW III–Permohonan alokasi ke KPA BUN/PPA BUN (20%), namun tahapan TW IV berupa penerbitan KMK penambahan Investasi Pemerintah (30%) belum dapat diselesaikan. Nota Dinas ND-743/PB.4/2025 tanggal 30 Juli 2025 dari Direktur SMI menghimbau PIP mengakselerasi penyusunan dokumen kelengkapan perencanaan kebutuhan sesuai PMK 172/2021. Hambatan utama adalah proses birokrasi lintas unit (DJKN, DJA) yang memerlukan waktu panjang.

Isu yang perlu didiskusikan dengan Direktorat PPKBLU: terdapat target kinerja keuangan (ROA dan ROE sebesar 9%) dalam penilaian maturitas yang dinilai tidak sesuai dengan karakter BLU berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 yang menetapkan BLU tidak mengutamakan pencarian keuntungan. PIP akan mengajukan usulan penyesuaian persepsi penilaian aspek tersebut.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian IKU ini antara lain:

- Penilaian Tata Kelola Maturitas BLU berbasis Aplikasi BIOS: sistem penilaian terpadu dari DJPb yang mencakup 6 aspek (Keuangan, Pelayanan, Kapabilitas Internal, Tata Kelola dan Kepemimpinan, Inovasi, Lingkungan) dengan mekanisme self-assessment, verifikasi Kanwil DJPb, dan validasi Direktorat PPKBLU.
- Program Manajemen Risiko Terintegrasi: penerapan manajemen risiko oleh Direktorat Hukum dan Manajemen Risiko PIP melalui Piagam Manajemen Risiko yang diperbaharui (Adendum 2025) dan mekanisme penghargaan bagi unit/pegawai yang berkontribusi pada manajemen risiko yang baik.
- Proses Penambahan Dana Kelolaan dari Saldo Kas BLU: program strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan UMi melalui penambahan dana bergulir sebesar Rp1 triliun dari surplus kas BLU, mengacu pada PMK 172/PMK.05/2021. Keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan penyaluran pembiayaan di tahun 2026.

IKU 4b-N: Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU

IKU Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU mengukur sejauh mana proyeksi pendapatan dan belanja yang dibuat pada awal bulan mendekati nilai realisasi pengesahan pada bulan tersebut. Semakin tinggi indeks menunjukkan pendapatan dan belanja yang disahkan semakin akurat sesuai dengan proyeksinya, yang mencerminkan kualitas perencanaan keuangan BLU PIP.

IKU ini terdiri dari tiga sub-indeks yang dihitung rata-ratanya setiap bulan:

- Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Proyeksi: mengukur ketepatan waktu penyampaian proyeksi pendapatan dan belanja pada awal bulan berjalan (melalui link yang disiapkan oleh Dit. PPKBLU). Bernilai 5 jika disampaikan tepat waktu, 0 jika terlambat.
- Indeks Ketepatan Pendapatan: mengukur kesesuaian antara proyeksi pendapatan yang ditetapkan awal bulan dengan realisasi pengesahan pendapatan pada bulan tersebut. Bernilai 5 jika realisasi sesuai proyeksi, turun jika terdapat deviasi.
- Indeks Ketepatan Belanja: mengukur kesesuaian antara proyeksi belanja yang ditetapkan awal bulan dengan realisasi pengesahan belanja pada bulan tersebut. Bernilai 5 jika sesuai proyeksi, turun (nilai 4) jika terdapat deviasi.

Formula: Indeks Bulanan = rata-rata (Indeks Ketepatan Waktu + Indeks Ketepatan Pendapatan + Indeks Ketepatan Belanja) ÷ 3. Indeks Triwulanan = rata-rata indeks 3 bulan dalam triwulan. Target tahun 2025: 3,5 (skala 5) untuk setiap triwulan. IKU ini bersifat Non-Cascading, konsolidasi Take Last Known Value (TLK), polarisasi Maximize, dikelola oleh Divisi Anggaran Direktorat Keuangan, Umum dan Sistem Informasi PIP.

Realisasi IKU ini pada Triwulan IV 2025 sebesar 4,5 dari target 3,5, dengan capaian 128,6%. Realisasi indeks tidak mencapai nilai maksimal 5 karena terdapat deviasi belanja pada bulan Desember 2025 sebesar 5% (realisasi Rp38,49 miliar vs proyeksi Rp40,72 miliar), sehingga Indeks Ketepatan Belanja hanya bernilai 4, dan rata-rata indeks Desember menjadi 4,5. Sepanjang TW I–TW III (Januari–November), seluruh bulan mencatat indeks sempurna 5. Rincian capaian triwulanan:

Capaian IKU 4b-N Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Max/TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	4,5	4,5	-
Capaian	142,8%	142,8%	142,8%	142,8%	142,8%	128,6%	128,6%	-

Rincian Bulanan Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU PIP Tahun 2025

Bulan	Tgl Penyampaian	Idx Waktu	Proy. Pend. (Rp M)	Pengesahan Pend. (Rp M)	Proy. Belanja (Rp M)	Pengesahan Belanja (Rp M)	Indeks
Januari	02/01/2025	5	41,57	41,57	2,02	2,02	5
Februari	03/02/2025	5	6,46	6,46	2,31	2,31	5
Maret	03/03/2025	5	46,12	46,13	2,51	2,51	5
April	08/04/2025	5	43,15	43,15	3,90	3,90	5
Mei	02/05/2025	5	48,40	48,40	4,91	4,91	5
Juni	02/06/2025	5	11,38	52,01	3,35	3,35	5
Juli	01/07/2025	5	51,25	51,25	6,88	6,88	5
Agustus	01/08/2025	5	47,56	48,17	5,48	5,48	5
September	01/09/2025	5	48,06	48,06	6,30	6,30	5
Oktober	01/10/2025	5	51,36	51,36	4,33	4,33	5
November	02/11/2025	5	42,70	42,77	8,13	8,13	5
Desember	01/12/2025	5	82,64	84,21	40,72	38,49	**4,5**
Rata-Rata Tahunan							**4,5**

Seluruh 12 bulan pada tahun 2025 memenuhi Indeks Ketepatan Waktu sempurna (indeks 5), menunjukkan konsistensi PIP dalam menyampaikan proyeksi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pada 11 bulan pertama (Januari–November) seluruh komponen indeks bernilai sempurna 5. Satu-satunya penyimpangan terjadi pada Desember 2025, di mana realisasi belanja sebesar Rp38,49 miliar lebih rendah 5,5% dari proyeksi Rp40,72 miliar, menghasilkan Indeks Ketepatan Belanja = 4 sehingga rata-rata indeks Desember menjadi 4,5. Pada bulan Juni, meskipun realisasi pendapatan (Rp52,01 miliar) jauh melampaui proyeksi (Rp11,38 miliar), indeks tetap bernilai 5 karena ketentuan penghitungan tidak mengurangi nilai saat realisasi melampaui proyeksi ke atas.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga akurasi proyeksi sepanjang tahun 2025:

- Monitoring dan pencatatan penerimaan harian: Divisi Anggaran melakukan pencatatan seluruh penerimaan yang masuk ke rekening BLU secara harian sebagai dasar penyusunan proyeksi bulanan yang akurat.
- Penyusunan rekapitulasi penerimaan per akhir bulan: Dibuat rekapitulasi penerimaan aktual setiap akhir bulan sebagai bahan evaluasi dan penginputan proyeksi bulan berikutnya pada link yang disiapkan oleh Dit. PPKBLU DJPb.
- Pengajuan SP3B BLU sejak awal bulan: Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dilakukan sejak awal bulan untuk menghindari keterbatasan waktu penyelesaian dan risiko kendala teknis di akhir bulan.

Keberhasilan menjaga indeks sempurna selama 11 bulan berturut-turut (Januari–November 2025) mencerminkan keberhasilan sistem monitoring harian dan disiplin penyampaian proyeksi tepat waktu oleh Divisi Anggaran. Pencapaian ini jauh melampaui target 3,5, menunjukkan kualitas perencanaan keuangan BLU PIP yang tinggi.

Penyimpangan Desember 2025: penurunan indeks ke 4,5 pada bulan Desember disebabkan adanya deviasi belanja sebesar 5% (Rp2,23 miliar di bawah proyeksi). Hal ini lazim terjadi pada akhir tahun anggaran karena adanya percepatan atau ketidakpastian dalam realisasi belanja operasional menjelang penutupan buku. Deviasi ini bersifat satu kali dan tidak mencerminkan kelemahan sistemik dalam pengelolaan keuangan BLU.

Rencana aksi ke depan: (1) pemantauan proses penginputan proyeksi pendapatan yang didasarkan pada pendapatan yang dipastikan diperoleh (bukan estimasi spekulatif); dan (2) pemantauan proses pengajuan SP3B secara tepat waktu di awal bulan berjalan, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

Pencapaian IKU ini ditunjang oleh program pengelolaan keuangan BLU yang akuntabel, khususnya: (1) sistem pencatatan penerimaan harian oleh Divisi Anggaran yang terintegrasi dengan rekening BLU PIP; (2) mekanisme SP3B bulanan yang tertib dan konsisten sejak awal bulan; dan (3) koordinasi aktif antara Direktorat Keuangan, Umum dan Sistem Informasi dengan Dit. PPKBLU DJPb dalam pelaporan dan verifikasi data proyeksi.

Sasaran Strategis 5: Pengelolaan Aset yang Akuntabel

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
5	**Pengelolaan aset yang akuntabel**			114.68
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%	0,64%	120
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	108,96%	108
5c-N	Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	100	120	120

IKU 5a-N: Persentase Tingkat Pengendalian Piutang Bermasalah

IKU Persentase Tingkat Pengendalian Piutang Bermasalah merupakan IKU Internal Process Perspective yang bertujuan mendorong agar piutang bermasalah dapat segera diselesaikan, baik melalui pembayaran kewajiban yang tertunda oleh lembaga penyalur maupun penyelesaian melalui optimalisasi piutang, sehingga kualitas portofolio pembiayaan BLU PIP tetap terjaga.

Kualitas piutang BLU digolongkan ke dalam empat kriteria berdasarkan keterlambatan pembayaran:

- Lancar: piutang yang pembayarannya berjalan normal sesuai perjanjian (keterlambatan 0–60 hari).
- Kurang Lancar: piutang yang mengalami keterlambatan pembayaran 61–180 hari.
- Diragukan: piutang dengan keterlambatan 181–240 hari, kemungkinan tertagihnya diragukan.
- Macet: piutang dengan keterlambatan lebih dari 240 hari, tidak dapat ditagih atau mengalami gagal bayar berkepanjangan.

Piutang bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) adalah piutang dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Formula IKU: NPL = (Outstanding piutang kurang lancar + diragukan + macet) ÷ Total outstanding piutang penyaluran × 100%. Polarisasi IKU adalah Minimize—semakin kecil realisasi NPL, semakin baik capaian IKU. Target maksimum NPL tahun 2025 sebesar 2% (ditingkatkan dari ≤1% pada 2023–2024 untuk mencerminkan risiko yang lebih realistis seiring pertumbuhan portofolio). Sumber data: Laporan Outstanding dan Kolektibilitas Penyaluran Pembiayaan UMKM yang diterbitkan Direktorat Pengelolaan Aset Piutang. IKU bersifat Non-Cascading, pelaporan triwulanan, konsolidasi Take Last Known Value (TLK), dikelola bersama Direktorat Keuangan Umum dan Sistem Informasi (KUSI) serta Direktorat Pengelolaan Aset Piutang (PAP).

2. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan Laporan Outstanding dan Kolektibilitas Penyaluran Pembiayaan UMKM per 31 Desember 2025 (setelah rekonsiliasi pembayaran tagihan bulan Desember), NPL PIP tercatat sebesar 0,62% dari total outstanding sebesar Rp8.349.001.709.283. Persentase NPL ini berada jauh di bawah target maksimum 2%, sehingga capaian IKU mencapai 120 (maksimum). Dibandingkan NPL bulan November 2025 sebesar 0,71%, NPL bulan Desember mengalami penurunan, utamanya karena peningkatan nilai outstanding akibat pencairan kepada penyalur baru dan top-up penyalur existing. Rincian kolektibilitas outstanding per 31 Desember 2025:

Tabel 16a. Kolektibilitas Outstanding Penyaluran Pembiayaan UMKM per 31 Desember 2025

Klasifikasi Kolektibilitas	Outstanding (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
Lancar (s.d. 60 hari)	8.297.530.018.698	99,38%	Normal, pembayaran sesuai jadwal
Kurang Lancar (61–180 hari)	111.333.334	0,001%	NPL
Diragukan (181–240 hari)	7.519.673.407	0,09%	NPL
Macet (>240 hari)	43.840.683.844	0,53%	NPL
TOTAL OUTSTANDING	**8.349.001.709.283**	**100%**	**NPL = 0,62%**

Penurunan NPL dari 0,71% (November 2025) menjadi 0,62% (Desember 2025) disebabkan oleh peningkatan outstanding akibat: (1) pencairan kepada penyalur baru—PT Delapan Pilar Tanggul Jaya, Koperasi Jasa LKM PPUMI, dan BMT Bisma; (2) pencairan tahap ketiga kepada PT PNM; (3) top-up pembiayaan dari PT BAV sebesar Rp15 miliar; dan (4) pengakuan klaim penjaminan yang telah diterima PIP dari PT Jamkrida Jateng sebagai pengurang outstanding pada KSPPS BMT Mitra Umat.

Tabel 16b. Capaian IKU 5a-N Persentase Tingkat Pengendalian Piutang Bermasalah Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	Min/TLK
Realisasi	0,73%	0,72%	0,72%	0,73%	0,73%	0,62%	0,62%	-
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	-

NPL bulan Desember 2025 sebesar 0,62% berasal dari 8 penyalur bermasalah. PIP menerapkan tiga lapis pengendalian piutang:

1. Pre-Financing: Pengendalian sebelum penetapan penyalur melalui pengecekan jaminan utama (fidusia) terhadap sampel debitur (maksimal 5% atau 30 sampel) dan kunjungan langsung ke lokasi aset jaminan tambahan, untuk memitigasi risiko sejak awal.
2. Portfolio Maintenance: Monitoring kewajiban penyalur secara rutin melalui SIKP, Fiducia, Laporan Keuangan, pendampingan, monev bulanan, dan pembinaan berkelanjutan selama dan setelah masa pencairan.
3. Pengelolaan Penyalur Bermasalah: melalui penagihan tertulis dan kunjungan langsung (collection), penyehatan melalui optimalisasi pembiayaan (restrukturisasi/perpanjangan tenor), serta penyelamatan melalui pencairan cash collateral, pencairan penjaminan, dan pelimpahan ke PUPN.

NPL sebesar 0,62% berasal dari 8 penyalur bermasalah dengan kondisi dan penanganan sebagai berikut:

Rincian Penyalur Bermasalah dan Status Penanganan per 31 Desember 2025

No	Nama Penyalur	Outstanding Tunggakan (Rp)	Status Kolektibilitas	Status Penanganan
1	KSP Karya Baitul Mandiri	34.075.983.507	Macet (100%)	Dilimpahkan ke PUPN Cabang Jateng (SP3N-121/PUPNC.13.03/2025 tgl 28 Agt 2025). Semua berstatus macet sejak 28 Nov 2024.
2	KSP KUD Mintorogo	5.960.450.988	Macet (100%)	Dilimpahkan ke PUPN Cabang Jateng (SP3N-035/PUPNC.15.01/2024 tgl 2 Mei 2024). Penagihan oleh KPKNL Semarang masih berlanjut.
3	KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	3.804.249.349	Macet (100%)	Macet sejak 12 Feb 2025. Dilimpahkan ke PUPN (SP3N-05/PUPNC.15.05/2025 tgl 3 Sep 2025). Dokumen jaminan diserahkan ke KPKNL Pekalongan (BA-6/IP.3/2025).
4	Koperasi Jasa Karya Abadi	1.750.000.000	Lancar 75%, Diragukan 25%	Optimalisasi disetujui (S-186/IP/2025) namun terkendala penolakan perpanjangan oleh Jamkrida Jatim. PIP bernegosiasi pengikatan HT-2 atas aset KJKA yang dijaminkan ke LPDB dan Bank Jatim.
5	Kopdit Pelangi Kasih	270.620.496	Diragukan (100%)	Permohonan optimalisasi diajukan (surat No.36/Keu-KKPK/II/2025). Dalam proses penandatanganan akad optimalisasi setelah negosiasi persyaratan jaminan.
6	KSPPS Raya Banda Madani	5.043.386.244	Diragukan (100%)	Permohonan optimalisasi diajukan. Rakom 13 Jun 2025: tenor diperpanjang 60 bulan. Rapat 30 Des 2025: data masih belum lengkap. Dokumen diminta dilengkapi Januari 2026.
7	KSPPS BMT Niaga Utama	600.000.000	Diragukan Rp400jt, Lancar Rp200jt	Permohonan optimalisasi (Jul 2025). Rapat komite 5 Des 2025 dan rapat online 29 Des 2025: data masih perlu dilengkapi (portofolio, RPK, RAT 2024, Akta AD). Diminta dilengkapi 5 Jan 2026.
8	KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri	167.000.001	KL Rp111jt, Diragukan Rp56jt	Permohonan optimalisasi (Sep 2025). Dokumen kelengkapan disampaikan 24 Des 2025 (No.415), masih dalam proses verifikasi.

Uraian kondisi dan langkah penanganan masing-masing penyalur bermasalah adalah sebagai berikut:

1. KSP Karya Baitul Mandiri — Tunggakan Rp34.075.983.507 (macet 100%). Tunggakan telah berstatus macet seluruhnya sejak 28 November 2024 dari 3 akad pembiayaan (2021–2023). Penanganan telah dilimpahkan ke PUPN Cabang Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam SP3N No.SP3N-121/PUPNC.13.03/2025 tanggal 28 Agustus 2025.
2. KSP KUD Mintorogo — Tunggakan Rp5.960.450.988 (macet 100%). Seluruh tunggakan berstatus macet dan telah dilimpahkan ke PUPN Cabang Jawa Tengah melalui SP3N Nomor SP3N-035/PUPNC.15.01/2024 tanggal 2 Mei 2024. Upaya penagihan masih dilanjutkan oleh KPKNL Semarang.
3. KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan — Tunggakan Rp3.804.249.349 (macet 100%). Seluruh piutang berstatus macet sejak 12 Februari 2025 (surat Dirut PIP No.S-56/IP/2025 tanggal 14 Februari 2025). Telah dilimpahkan ke PUPN Jawa Tengah (SP3N-05/PUPNC.15.05/2025 tanggal 3 September 2025). Dokumen jaminan telah diserahkan ke KPKNL Pekalongan dengan Berita Acara Serah Terima No.BA-6/IP.3/2025 tanggal 22 September 2025.
4. Koperasi Jasa Karya Abadi (KJKA) — Tunggakan Rp1.750.000.000 (lancar 75%, diragukan 25%). Tunggakan terjadi sejak Juni–Desember 2024. Optimalisasi telah disetujui (S-186/IP/2025) dan akad optimalisasi No.81 tanggal 4 Juli 2025 dengan perpanjangan 46 bulan (termasuk grace period 16 bulan, jatuh tempo Mei 2029). Namun akad tidak dapat dilaksanakan karena Jamkrida Jawa Timur tidak memberikan persetujuan perpanjangan penjaminan. PIP mengupayakan pengikatan Hak Tanggungan Kedua (HT-2) atas aset KJKA yang dijaminkan ke LPDB dan Bank Jatim, namun persetujuan dari LPDB dan koordinasi teknis dengan Bank Jatim masih berlangsung (surat S-316/IP/2025 ke LPDB dan S-306/IP/2025 ke Bank Jatim).
5. Kopdit Pelangi Kasih — Tunggakan Rp270.620.496 (diragukan 100%, dari 4 tagihan pokok). Permohonan optimalisasi diajukan melalui surat No.36/Keu-KKPK/II/2025 tanggal 4 Maret 2025 dan telah diterima. Proses penandatanganan akad optimalisasi masih berlangsung setelah beberapa kali perundingan terkait persyaratan jaminan tambahan.
6. KSPPS Raya Banda Madani — Tunggakan Rp5.043.386.244 (diragukan 100%, 8 angsuran dari 2 SP3). Permohonan optimalisasi diajukan Maret 2025. Rakom 13 Juni 2025 menyetujui opsi perpanjangan tenor 60 bulan. Kunjungan lapangan dilakukan 18–19 September 2025. Rapat online 30 Desember 2025 (UND-50/IP/IP.3/2025) menyimpulkan data dan informasi dari KSPPS Rabani belum lengkap. Pemenuhan dokumen diminta selesai minggu pertama Januari 2026.
7. KSPPS BMT Niaga Utama — Tunggakan Rp600.000.000 (diragukan Rp400 juta, lancar Rp200 juta, dari 6 tagihan). Permohonan optimalisasi diajukan 15 Juli 2025 (No.S.008/BMTNU/VII/2025). Rapat komite 5 Desember 2025 dan rapat online 29 Desember 2025 (UND-49/IP/IP.3/2025) menghasilkan permintaan kelengkapan 4 dokumen: portofolio pembiayaan, RPK per triwulan, RAT Tahun Buku 2024, dan Akta AD terkait pengurus baru. BMT Niaga Utama menyampaikan dokumen pada 17 Desember 2025 namun masih belum lengkap dan tanpa surat pengantar. Proses verifikasi masih berlanjut.
8. KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri — Tunggakan Rp167.000.001 (kurang lancar Rp111 juta, diragukan Rp56 juta, dari 3 angsuran). Permohonan optimalisasi diajukan 15 September 2025. Dokumen kelengkapan disampaikan 24 Desember 2025 (No.415) namun masih dalam proses verifikasi untuk selanjutnya dimintakan rekomendasi direktorat terkait.

Dari 8 penyalur bermasalah, 3 penyalur telah dilimpahkan ke PUPN (mekanisme terakhir penagihan paksa oleh negara), 2 penyalur dalam proses optimalisasi yang terkendala aspek penjaminan, dan 3 penyalur masih dalam proses verifikasi permohonan optimalisasi. Faktor penyebab keterlambatan meliputi: likuiditas koperasi yang tertekan akibat penarikan simpanan anggota, penurunan kinerja keuangan, ketidakcukupan jaminan, dan hambatan birokrasi dalam proses restrukturisasi lintas kreditur (LPDB, Bank Jatim, dan Jamkrida).

PIP memiliki mekanisme pengendalian piutang yang terstruktur dalam tiga lapisan (pre-financing, portfolio maintenance, dan pengelolaan bermasalah), yang memungkinkan pendeteksian dan penanganan risiko piutang secara dini dan sistematis. Pemanfaatan sistem SIKP untuk monitoring kewajiban penyalur secara real-time, serta sinergi dengan PUPN dan KPKNL untuk penanganan piutang macet, mengoptimalkan penggunaan sumber daya kelembagaan yang tersedia tanpa memerlukan penambahan kapasitas signifikan.

Pencapaian IKU NPL ≤2% ini ditunjang oleh beberapa program:

- Sistem Informasi Kredit Program (SIKP): platform monitoring penyaluran dan pembayaran angsuran penyalur secara real-time, yang menjadi tulang punggung portfolio maintenance PIP.
- Program Optimalisasi Piutang: mekanisme restrukturisasi/perpanjangan tenor bagi penyalur yang mengalami kesulitan keuangan namun masih memiliki prospek penyelesaian, sebagai alternatif sebelum pelimpahan ke PUPN.
- Kerja Sama dengan PUPN/KPKNL: pelimpahan pengurusan piutang macet kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai mekanisme penagihan paksa oleh negara untuk piutang yang tidak dapat diselesaikan secara sukarela.
- Mekanisme Penjaminan: kerja sama dengan perusahaan penjaminan (Jamkrida) untuk mitigasi risiko piutang bermasalah, di mana klaim penjaminan yang diterima menjadi pengurang outstanding NPL secara langsung.

IKU 5b-N: Persentase Coverage Jaminan Pembiayaan UMKM

IKU Persentase *Coverage* Jaminan Pembiayaan UMKM merupakan IKU dengan perspektif Internal Process yang berada di bawah Sasaran Strategis Pengelolaan Aset yang Optimal. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecukupan jaminan yang diserahkan oleh Penyalur kepada Pusat Investasi Pemerintah sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko atas piutang pembiayaan UMKM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024, Penyalur wajib menyerahkan jaminan minimal sebesar nilai plafon pembiayaan. Jaminan tersebut dapat berupa piutang lancar, tagihan piutang, bahan/peralatan/hasil usaha, deposit dana, dan/atau bentuk lain sesuai karakteristik usaha Penyalur. Berdasarkan penilaian risiko, PIP juga dapat meminta jaminan tambahan seperti *fixed asset* (aset tetap) atau aset tetap hasil optimalisasi. Dalam penghitungan IKU, Penyalur yang piutangnya telah bermasalah dan dilimpahkan penanganannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dikecualikan dari perhitungan untuk menghindari distorsi.

Formula IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Coverage Jaminan} = \frac{\text{Total Nilai Jaminan Pembiayaan}}{\text{Total Outstanding Penyaluran UMKM}} \times 100\%$$

di mana:

- Total Nilai Jaminan Pembiayaan mencakup piutang lancar, *cash collateral*, jaminan aset tetap, dan aset tetap hasil optimalisasi.
- Total Outstanding Penyaluran UMKM adalah total piutang PIP kepada para Penyalur.

IKU ini bersifat Non-Cascading dengan tingkat kendali Moderate dan tingkat validitas Proxy. Periode pelaporan dilakukan secara triwulanan dengan konsolidasi Take Last Known Value (TLK) serta polarisasi Maximize, yang berarti semakin tinggi persentase *coverage* jaminan, semakin baik capaian kinerjanya. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 100%. Unit penanggung jawab IKU ini adalah Direktorat Pengelolaan Aset Piutang.

[2. Perbandingan Realisasi dengan Target]

Berdasarkan laporan posisi akhir bulan Desember 2025, realisasi IKU Persentase *Coverage* Jaminan Pembiayaan UMKM mencapai 108,96%. Angka ini diperoleh dari total nilai jaminan sebesar Rp8,92 triliun yang mencakup outstanding pembiayaan UMKM sebesar Rp8,35 triliun. Dengan capaian ini, realisasi IKU 5b-N melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%.

Rincian *coverage* jaminan per bulan pada Triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

- Oktober 2025: *Coverage* jaminan mencapai 114,22% (nilai jaminan Rp7,84 triliun dari outstanding Rp6,87 triliun).
- November 2025: *Coverage* jaminan mencapai 105,77% (nilai jaminan Rp7,84 triliun dari outstanding Rp7,41 triliun).
- Desember 2025: *Coverage* jaminan mencapai 106,90% (nilai jaminan Rp8,92 triliun dari outstanding Rp8,35 triliun).

Berikut adalah rincian capaian triwulanan sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren konsisten di atas target:

Tabel 16. Capaian IKU 5b-N Persentase Coverage Jaminan Pembiayaan UMKM Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Min/TLK
Realisasi	102,52%	104,16%	104,16%	103,33%	103,33%	108,96%	108,96%	-
Capaian	102,52%	104,16%	104,16%	103,33%	103,33%	108,96%	108,96%	-

Pencapaian target *coverage* jaminan di atas 100% sepanjang tahun 2025, dengan lonjakan signifikan di Triwulan IV, menunjukkan efektivitas pengelolaan jaminan pembiayaan oleh PIP. Beberapa faktor pendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Sistem Peringatan Dini (Reminder System) yang Efektif: PIP secara rutin mengingatkan para Penyalur untuk memperbarui kecukupan jaminan fidusia setiap akhir bulan melalui SIKP UMi, termasuk mengirimkan pengingat H-5 sebelum batas waktu pelaporan melalui grup *WhatsApp*. Hal ini mendorong kepatuhan dan ketertiban administrasi jaminan.
2. Koordinasi dan Asistensi Intensif: Tim PIP secara aktif berkoordinasi dan memberikan asistensi kepada Penyalur untuk melancarkan proses *upload* data jaminan ke dalam sistem SIKP UMi, memastikan data yang dilaporkan akurat dan tepat waktu.
3. Optimalisasi Jaminan Tambahan: Terhadap Penyalur yang bermasalah atau memiliki risiko tinggi, PIP secara agresif mendorong penambahan jaminan di luar jaminan utama (piutang lancar). Upaya ini berhasil diwujudkan dengan dilakukannya akad penambahan jaminan berupa tanah dan bangunan, antara lain dengan KSPPS BMT Mitra Umat pada tanggal 9 Mei 2025 dan KSP Karya Baitul Mandiri pada tanggal 16 April 2025.
4. Penguatan Regulasi Internal: Penerbitan Peraturan Direktur Utama PIP terkait jaminan Pembiayaan UMKM yang secara tegas mensyaratkan pemenuhan jaminan tambahan (*fixed asset*, surat berharga) selain jaminan utama, memberikan landasan hukum yang kuat bagi PIP dalam melakukan mitigasi risiko.
5. Peningkatan Outstanding Pembiayaan: Peningkatan nilai *outstanding* di akhir tahun, yang didorong oleh pencairan kepada penyalur baru dan *top-up* penyalur *existing*, turut berkontribusi pada kenaikan nilai absolut jaminan. Meskipun *coverage* sedikit menurun dari Oktober ke November, nilai jaminan tetap terjaga dan meningkat signifikan di bulan Desember.

Meskipun target tercapai, terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu adanya beberapa Penyalur dengan status piutang bermasalah (NPL) yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kecukupan jaminan piutang lancarnya. Akar masalahnya terletak pada penurunan kualitas portofolio piutang Penyalur itu sendiri, yang menyebabkan jaminan utama (piutang lancar) ikut terdepresiasi nilainya. Hal ini membutuhkan intervensi lebih lanjut berupa penambahan jaminan keras (*fixed asset*) yang prosesnya lebih kompleks.

[4. Rekomendasi Rencana Aksi]

Untuk memitigasi tantangan tersebut dan menjaga tingkat *coverage* jaminan yang sehat ke depannya, PIP telah dan akan terus melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Bermasalah: Terus mendorong Penyalur yang berstatus bermasalah untuk melakukan penambahan jaminan dalam bentuk *fixed asset* (aset tetap) sebagai bagian dari skema optimalisasi atau restrukturisasi pembiayaan. Proses ini akan terus dimonitor dan difasilitasi.
2. Monitoring Berkala yang Lebih Ketat: Meningkatkan frekuensi dan intensitas monitoring tingkat pemenuhan kecukupan jaminan pada setiap Penyalur/ *linkages*, tidak hanya pada akhir bulan, tetapi juga secara *real-time* melalui dashboard SIKP untuk mengidentifikasi potensi penurunan *coverage* lebih dini.
3. Edukasi dan Pembinaan Berkelanjutan: Melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Penyalur mengenai pentingnya manajemen risiko dan implikasi dari penurunan kualitas piutang terhadap kewajiban pemenuhan jaminan kepada PIP, serta tata cara pengikatan jaminan tambahan.

IKU 5c-N: Persentase Realisasi Nilai Penyaluran Pembiayaan UMKM kepada Debitur

IKU Persentase Realisasi Nilai Penyaluran Pembiayaan UMKM kepada Debitur merupakan IKU dengan perspektif Internal Process yang berada di bawah Sasaran Strategis Pengelolaan Aset yang Optimal. IKU ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Pusat Investasi Pemerintah dalam menyalurkan dana bergulir kepada debitur UMKM sebagai bentuk pelaksanaan mandat *special mission* pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Realisasi IKU ini dihitung berdasarkan nilai penyaluran pembiayaan UMKM yang berhasil disalurkan kepada debitur melalui para Penyalur (LKBB/LKM/Lembaga Non LJK) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target tahun 2025 untuk nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur adalah sebesar Rp9,45 triliun. Sumber data berasal dari laporan realisasi penyaluran yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP-UMi). IKU ini bersifat Non-Cascading dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLK) dan polarisasi Maximize, yang berarti semakin tinggi persentase realisasi penyaluran, semakin baik capaian kinerjanya. Unit penanggung jawab IKU ini adalah Direktorat Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan.

Realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 mencapai Rp12.193.198.938.700 (Rp12,19 triliun). Capaian ini setara dengan 129% dari target Triwulan IV yang diproyeksikan. Apabila dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar Rp9,45 triliun, realisasi tersebut mencapai 129% dari target, atau setara dengan capaian IKU sebesar 120% (setelah mempertimbangkan batas maksimum capaian IKU).

Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana PIP tidak hanya berhasil memenuhi target penyaluran tahunan, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Rincian capaian triwulanan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IKU 5c-N Persentase Realisasi Nilai Penyaluran Pembiayaan UMKM Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	13,5%	45,5%	45,5%	68,5%	68,5%	100%	100%	Min/TLK
Realisasi	13,7%	51,01%	51,01%	71,35%	71,35%	120%	120%	-
Capaian	101,48%	112,11%	112,11%	104,16%	104,16%	120	120	-

Keberhasilan pencapaian target nilai penyaluran yang melampaui ekspektasi ini didukung oleh beberapa faktor utama dan upaya extra effort yang dilakukan PIP sepanjang tahun 2025:

Akad Baru Berskala Besar: Akad perjanjian pembiayaan dengan PT PNM (Permodalan Nasional Madani) sebesar Rp2 triliun pada bulan Oktober 2025 menjadi pendorong utama akumulasi nilai penyaluran di Triwulan IV. Selain itu, akad dengan PT Pegadaian sebesar Rp250 miliar (Desember 2025) serta skema linkage BAV (Komida dan Komida Syariah) masing-masing sebesar Rp90 miliar dan Rp40 miliar turut memberikan kontribusi signifikan.

Kontribusi Penyalur Lain: Penyaluran pada BMT NU Jatim juga menjadi tambahan yang cukup berkontribusi terhadap capaian penyaluran di Triwulan IV 2025.

Monitoring dan Optimalisasi Revolving: PIP secara aktif melakukan monitoring realisasi penyaluran melalui dashboard SIKP-UMi serta menyampaikan data potensi revolving penyaluran kepada seluruh penyalur secara berkala. Hal ini mendorong penyalur untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban revolving dan mengajukan top-up pembiayaan.

Percepatan Proses E-Proposal: PIP mendorong percepatan penyelesaian permohonan penyalur baru atau permohonan top-up melalui sistem e-proposal, sehingga proses persetujuan dan pencairan dana dapat berlangsung lebih cepat.

Di balik capaian yang impresif, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk keberlanjutan program:

Konsentrasi Penyalur: Penyaluran masih terbatas dan terkonsentrasi pada penyalur LKBB afiliasi pemerintah, terutama PNM, Pegadaian, dan BAV. Hal ini menimbulkan risiko ketergantungan yang tinggi dan memerlukan upaya diversifikasi penyalur.

Kendala Jaminan pada Skema UMi Pro: Penyalur masih sering terkendala pada pemenuhan persyaratan jaminan yang lebih ketat untuk mengajukan permohonan menjadi penyalur atau tambahan pembiayaan pada skema UMi Pro. Akibatnya, ekspansi penyaluran melalui skema ini belum dapat optimal.

Mitigasi Risiko UMi Pro: Skema UMi Pro dengan plafon yang lebih tinggi (hingga Rp100 juta) memerlukan perhatian khusus dan mitigasi risiko yang lebih ketat, sehingga proses penyaluran kepada debitur melalui skema ini belum dapat dimaksimalkan.

Sasaran Strategis 6: Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
6	**Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**			102.63
6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	100
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	95	100	100

IKU 6a-N: Indeks Kualitas Laporan Keuangan PIP

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah, serta mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Berdasarkan pasal 270 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, pemeriksaan ekstern terhadap laporan keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan Kantor Akuntan Publik. Penilaian kualitas Laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah acuan penyusunan laporan keuangan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4).

Target IKU Indeks opini Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 adalah indeks 4 (Wajar Tanpa Pengecualian). Target ini sama dengan tahun 2024 dan merupakan target maksimal untuk IKU dimaksud, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4 dari skala 4).

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulanan, polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Realisasi IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan PIP tahun 2025 mencapai nilai 4 dari target 4, dengan capaian 100%. Rincian capaian triwulanan:

Capaian IKU 6a-N Indeks Kualitas Laporan Keuangan PIP Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4 (skala 4)	Max/TLK
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	-
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Kualitas laporan keuangan yang baik dipertahankan melalui koordinasi yang baik antara penyusun laporan keuangan dengan SPI, pembina dari KPPN, APK, SITP, dan Rocankeu. Laporan keuangan triwulanan berhasil disampaikan dengan tepat waktu sepanjang tahun 2025. Tidak adanya temuan dalam pemeriksaan KAP mencerminkan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.



IKU 6b-N: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas Pusat Investasi Pemerintah dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan Pusat Investasi Pemerintah yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah. Penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal adalah persentase atas penyelesaian rekomendasi dan/atau temuan audit dari Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas yang merupakan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas rekomendasi dan/atau temuan yang disampaikan Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas, secara tepat waktu yang memadai berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Formulasi IKU Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Total Rekomendasi atau temuan yang ditidaklanjuti)}}{\text{Total Rekomendasi atau temuan}} \times 100\%$$

Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monitoring dan evaluasi/pemantauan/ pemeriksaan s.d. 31 Desember 2025. Pengukuran capaian nilai penyelesaian rekomendasi pembina/pengawas/pemeriksa internal dan eksternal dihitung berdasarkan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi yang dinyatakan memadai oleh pihak internal dan eksternal yang melakukan Pembinaan/Pengawasan/ Pemeriksaan.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulan, polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). IKU ini merupakan IKU mandatory dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum. Target IKU persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal tahun 2025 ditetapkan sebesar 95%, dengan capaian 100.

Rincian capaian triwulanan:

Tabel 19. Capaian IKU 6b-N Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
Capaian	105%	105%	105%	105%	105%	100	100	-

Pada tahun 2025, Pusat Investasi Pemerintah mendapatkan 14 (empat belas) rekomendasi dari Tim Pemeriksa/Pembina. 11 (sebelas) diantaranya Jatuh tempo di tahun 2025 telah selesai ditindaklanjuti (100%) sedangkan 3 (tiga) jatuh tempo di tahun 2026. Rincian 14 temuan tersebut yaitu:

- 1 temuan hasil pemeriksaan atas LK tahun 2024 oleh tim BPK RI terkait SPRINT. PIP sudah menindaklanjuti dengan rutin membuat Laporan Pengelolaan Rekening.
- 3 temuan hasil audit laporan keuangan oleh KAP DBSDA telah ditindaklanjuti.
- 5 rekomendasi Dit. SMI telah selesai ditindaklanjuti sebagaimana ND 4/IP/2026, sedangkan 1 masih dalam progress penyelesaian sesuai jatuh tempo di tahun 2026.
- 2 rekomendasi Dit. PPK BLU telah ditindaklanjuti sedangkan sisanya 2 rekomendasi masih dalam progress penyelesaian sesuai jatuh tempo di tahun 2026.

Keberhasilan penyelesaian seluruh rekomendasi (100%) mencerminkan komitmen PIP dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat waktu. Hal ini didukung oleh pelaksanaan audit SPI sesuai PKPT 2025 dan koordinasi internal yang intensif dalam pemenuhan dokumen tindak lanjut dari tim pemeriksa/pengawas.

Sasaran Strategis 7: Pengelolaan Organisasi yang Adaptif

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
7	**Pengelolaan organisasi yang adaptif**			101.18
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	87	102
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100

IKU 7a-N: Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Direkorat Jenderal Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategic Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Formulasi IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategic Focused Organization adalah sebagai berikut: **Nilai Hasil Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbedaharaan**

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2025 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor nomor KEP-14/PB.1/2026 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai total sebesar 87,47. Nilai total atas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja tersebut diperoleh dari:

a. Pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (dengan bobot penilaian sebesar 80%) mendapatkan nilai 86.73.
b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 (dengan bobot penilaian sebesar 20%) mendapatkan nilai 90,42 (yang dikonversi dari NKO tahun 2025 sebesar 108,50).

Capaian tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization tersebut telah melampaui target IKU yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 85, dan capaian tersebut mengalami peningkatan capaian jika dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai sebesar 87,36. Untuk menjaga pencapaian kinerja ini, Pusat Investasi Pemerintah akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran (awareness) dari seluruh pegawai, terutama pengelola kinerja pada Pusat Investasi Pemerintah terkait dengan perubahan/penyesuaian atas langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada tahun 2025, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan kualitas kinerja ada tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik;
b. Meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pendokumentasian seluruh kegiatan pendukung sehingga dapat menjadi bukti pendukung dalam penilaian kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada Pusat Investasi Pemerintah.

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 mencapai nilai 87 dari target 85, dengan capaian 102. Rincian capaian triwulanan:

Capaian IKU 7a-N Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	85	85	85	85	85	87	87	-
Capaian	100	100	100	100	100	102	102	-

Peningkatan nilai SFO pada Triwulan IV didorong oleh penyelesaian kelengkapan dokumen SFO dan input kelengkapan dokumen pada aplikasi Intense DJPb secara tepat waktu. Ke depan, PIP perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja melalui penyempurnaan dokumen kontrak kinerja dan monitoring capaian kinerja secara berkala.

IKU 7b-N: Persentase Penerapan Inovasi Layanan

IKU ini mengukur realisasi penerapan inovasi layanan PIP yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis layanan pembiayaan UMKM.

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 mencapai 100% dari target 100%, dengan capaian 100. Inovasi layanan utama yang berhasil diimplementasikan adalah Aplikasi UMiConnect yang diluncurkan pada tahun 2025 dan telah digunakan oleh mitra penyalur KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri (BISMA) dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Rincian capaian triwulanan:

Tabel 21. Capaian IKU 7b-N Persentase Penerapan Inovasi Layanan Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	45%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	-
Capaian	120	112	112	100	100	100	100	-

3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Inovasi UMiConnect dikembangkan bekerja sama dengan PT Media Rekayasa Lintas (PT Marlin) dan telah melalui serangkaian tahapan pengembangan, benchmarking sistem blockchain dengan PT ALKO dan PT Indigo Digital Goldstar, User Acceptance Test (UAT), serta perbaikan berdasarkan hasil UAT. Ke depan, PIP merencanakan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas Aplikasi UMiConnect dan UMi ICS, serta perluasan implementasi kepada Lembaga Non LJK dan LKBB dengan karakteristik debitur berliterasi teknologi memadai.



Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
8	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**			100
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100

IKU 8a-CP: Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu

IKU ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran PIP berdasarkan dua komponen: Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi DJPb (bobot 50%) dan nilai SMART dari aplikasi DJA (bobot 50%).

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 mencapai 100 dari target 100, dengan capaian 100%. Rincian komponen penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Komponen IKU 8a-CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu Tahun 2025

No	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai Akhir
A.	Aplikasi IKPA DJPb	50%	100	50,00	
1	Revisi DIPA	10%	100	10,00	
2	Deviasi Hal III DIPA	15%	100	15,00	
3	Capaian Output	25%	100	25,00	
B.	Aplikasi SMART DJA	50%	100	50,00	
1	Nilai Kinerja Perencanaan		100		
	- Capaian RO	75%	100	75,00	
	- Penggunaan SBK	10%	100	10,00	
	- Efisiensi SBK	15%	100	15,00	
2	Nilai Kinerja Pelaksanaan		100		
	- Revisi DIPA	10%	100	10,00	
	- Deviasi Halaman III DIPA	15%	100	15,00	
	- Capaian Output	25%	100	25,00	
C.	Nilai IKU	100%			100,00

Tabel 23. Capaian IKU 8a-CP Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	-
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu sebesar 100 menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran yang sangat baik. Angka efisiensi diperoleh dengan memperhatikan PMK No. 92 Tahun 2024 yang menetapkan SBK Khusus sebesar Rp21.574/usaha mikro. Dengan realisasi belanja sebesar Rp21.846.526.788 dan realisasi output 2.176.194 usaha mikro, besaran yang diperoleh hanya sebesar Rp10.038,86/usaha mikro—jauh di bawah SBK yang ditetapkan, mencerminkan efisiensi yang sangat signifikan.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Sarana dan TIK yang Adaptif dan Modern

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
9	**Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern**			101.13
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi PIP	100	109	109
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	100	100

IKU 9a-N: Persentase Tingkat Uptime dan Pengelolaan Layanan Aplikasi Pusat Investasi Pemerintah

IKU Persentase Tingkat Uptime dan Pengelolaan Layanan Aplikasi PIP merupakan IKU Learning and Growth Perspective yang mengukur tingkat ketersediaan dan keandalan layanan aplikasi yang dikelola PIP dalam menunjang proses penyaluran dan pengawasan pembiayaan UMKM. Cakupan pengukuran meliputi komponen ketersediaan (availability) aplikasi-aplikasi di lingkungan PIP, penyelesaian pengembangan aplikasi/modul yang menjadi prioritas, serta komitmen SDM untuk men-deliver layanan TIK yang optimal. Semakin tinggi persentase realisasi, semakin andal dan stabil layanan aplikasi yang diberikan kepada penyalur, debitur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sepanjang tahun 2025, realisasi kinerja IKU 9a-N menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target. Pada Triwulan I realisasi mencapai 115%, Triwulan II sebesar 111%, Semester I sebesar 111%, Triwulan III meningkat menjadi 112%, dan s.d. Triwulan III tetap berada pada 112%. Pada Triwulan IV realisasi tercatat sebesar 109%, dengan capaian akhir tahun (TLK) mencapai 115% sehingga capaian IKU mencapai 120 (maksimum). Rincian triwulanan:

Capaian IKU 9a-N Persentase Tingkat Uptime dan Pengelolaan Layanan Aplikasi Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	115%	111%	111%	112%	112%	109%	115%	-
Capaian	117%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	-

Upaya-upaya yang dilakukan PIP dalam rangka pencapaian target kinerja IKU ini meliputi:

- Mengakselerasi penyelesaian atas permintaan-permintaan pengembangan aplikasi, baik melalui pengembangan oleh tim internal maupun menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga respons terhadap kebutuhan baru dapat dilakukan lebih cepat.
- Mengoptimalkan SDM dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai dampak perubahan proses bisnis akibat terbitnya PMK 130/2024 dan program strategis nasional.
- Penyediaan perangkat proteksi pasokan listrik (UPS) khusus untuk perangkat TIK, sehingga gangguan listrik yang kerap terjadi tidak mengakibatkan gangguan terhadap akses pada aplikasi.
- Memulai pengembangan aplikasi sejak awal tahun sehingga memberikan waktu yang lebih panjang untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan, yang berpotensi meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu implementasi.

Potensi keberhasilan yang menjadi faktor pendorong capaian IKU ini:

- Akselerasi penyelesaian pengembangan aplikasi melalui kolaborasi internal dan pihak ketiga memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan baru dan perubahan regulasi.
- Optimalisasi SDM dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal membantu mengakomodasi kebutuhan perubahan proses bisnis agar lebih efektif.

- Penyediaan perangkat proteksi pasokan listrik meminimalisir gangguan terhadap operasional perangkat TIK dan mengurangi risiko gangguan jaringan komunikasi data akibat pemadaman listrik.
- Pengembangan aplikasi sejak awal tahun memberikan waktu yang lebih panjang untuk pelaksanaan kegiatan, yang berpotensi meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu implementasi.

Potensi risiko yang perlu diantisipasi ke depan:

- Penyesuaian aturan yang dapat terjadi beberapa kali akan memerlukan penyesuaian di sisi aplikasi, sehingga meningkatkan beban pengembangan aplikasi secara signifikan.
- Program strategis nasional yang berdampak terhadap perubahan proses bisnis internal PIP berpotensi menimbulkan risiko koordinasi, pengembangan/penyesuaian aplikasi, dan sinkronisasi data yang kurang optimal.
- Masih adanya gangguan pasokan listrik yang sering terjadi; gangguan yang berlangsung lama dapat mengganggu kinerja perangkat TIK meskipun telah tersedia UPS.
- Beban pengembangan aplikasi yang meningkat drastis di akhir tahun dapat memicu keterlambatan penyelesaian jika sumber daya tidak ditambah atau manajemen proyek kurang optimal.
- Risiko ketidaksesuaian antara kebutuhan regulasi dan pengembangan aplikasi dapat menyebabkan hasil pengembangan belum memenuhi keseluruhan ekspektasi pengguna.

Pengelolaan sarana dan TIK PIP berhasil menjaga tingkat uptime dan kualitas layanan aplikasi secara optimal meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan pengembangan sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya respons cepat dalam penanganan gangguan, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas pengelolaan sistem untuk memastikan layanan pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana tetap berjalan secara andal, stabil, dan akuntabel.

Layanan TIK yang disediakan PIP telah mendukung Program Strategis Nasional melalui pengembangan aplikasi dan integrasi host-to-host (H2H) untuk pembiayaan UMKM dengan skema Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian uptime yang melampaui target menunjukkan bahwa sistem dikelola secara andal dan stabil, sehingga mampu menunjang pertukaran data, monitoring, dan pelaporan secara cepat dan akurat antar stakeholder. Keandalan layanan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan proses penyaluran dan pengawasan pembiayaan UMKM berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Rencana aksi ke depan meliputi: (a) re-engineering aplikasi untuk menyesuaikan arsitektur agar menjadi aplikasi yang agile mengikuti perubahan proses bisnis; (b) penerapan change management dan perencanaan rilis terjadwal untuk mengendalikan permintaan pengembangan baru serta penyusunan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak terhadap layanan utama; (c) peningkatan monitoring sistem 24/7 dengan notifikasi dini (early warning system); dan (d) evaluasi berkala capaian SLA dan analisis akar masalah (root cause analysis) atas setiap insiden.

IKU 9b-N: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

IKU Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU merupakan IKU Learning and Growth Perspective yang mengukur tingkat penyelesaian program modernisasi tata kelola BLU PIP melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem. Realisasi IKU diukur dari penyelesaian lima komponen modernisasi: (1) Integrasi Data; (2) Analitika Data; (3) Sistem Informasi Manajemen; (4) Website; dan (5) Operasionalisasi BIOS. IKU ini bertujuan mendorong pengelolaan BLU yang semakin akuntabel, transparan, dan efisien melalui otomatisasi, integrasi antar sistem, serta peningkatan kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan dan layanan.

Sepanjang tahun 2025, realisasi IKU 9b-N secara konsisten melampaui target triwulanan. Pada Triwulan I realisasi mencapai 35,3% dari target 25% (capaian 120%), Triwulan II sebesar 58,6% dari target 50% (capaian 116%), Triwulan III sebesar 77% dari target 75% (capaian 102%), dan pada Triwulan IV seluruh komponen modernisasi berhasil diselesaikan sehingga realisasi mencapai 100% dari target 100% (capaian 100%). Rincian triwulanan:

Capaian IKU 9b-N Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	35,3%	58,6%	58,6%	77%	77%	100%	100%	-
Capaian	120%	116%	116%	102%	102%	100%	100%	-

Upaya-upaya yang dilakukan PIP dalam rangka pencapaian target modernisasi BLU tahun 2025 meliputi:

- Penyelesaian pengembangan integrasi data pendapatan pada Aplikasi SIKP UMi ke SIMEKA, sehingga data pendapatan dari penyaluran pembiayaan UMKM dapat langsung tersinkronisasi ke sistem manajemen keuangan PIP secara akurat dan otomatis.
- Pengembangan integrasi dengan Bank Mandiri, BNI, dan BSI (bank Himbara), membuka peluang sinkronisasi data rekening dan transaksi keuangan secara lebih real-time dan mengurangi proses manual.
- Pengembangan sistem H2H pengiriman data ke BIOS (Business Intelligence and Operations System), memungkinkan pelaporan kinerja dan keuangan BLU secara digital dan terjadwal langsung ke sistem DJPb.

Potensi keberhasilan yang menjadi faktor pendorong capaian IKU ini:

- Integrasi sistem aplikasi secara langsung mengurangi risiko yang disebabkan oleh human error, khususnya untuk proses rekonsiliasi dan pembaruan data secara periodik.
- Otomatisasi melalui cronjob/scheduling API dapat memastikan pengiriman data berjalan terjadwal dan konsisten tanpa intervensi manual.
- Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan dan penyaluran pembiayaan UMKM untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BLU.
- Dukungan integrasi dengan bank Himbara (Mandiri, BNI, BSI) membuka peluang sinkronisasi data yang lebih real-time dan mengurangi risiko selisih data keuangan.

Potensi risiko yang perlu diantisipasi:

- Ketergantungan pada sistem dan jaringan eksternal, khususnya dalam hal konektivitas yang dapat menghambat pengiriman data H2H jika terjadi gangguan jaringan.
- Perbedaan environment aplikasi antara PIP dan pihak eksternal dapat menyebabkan gagal sinkronisasi data dan memerlukan proses debugging yang memakan waktu.
- Risiko keamanan data (data integrity & security) dalam proses integrasi API dan H2H yang perlu dimitigasi secara berkelanjutan.

Penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU PIP secara penuh (100%) pada tahun 2025 memberikan dampak efisiensi jangka panjang yang signifikan. Otomatisasi proses rekonsiliasi dan pengiriman data yang sebelumnya dilakukan secara manual berkontribusi langsung pada pengurangan beban kerja, peningkatan akurasi data, dan percepatan pelaporan kepada DJPb. Keandalan layanan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan proses penyaluran dan pengawasan pembiayaan UMKM berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Program modernisasi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2025 meliputi lima komponen utama, yaitu: (1) Integrasi Data—mencakup integrasi SIKP UMi ke SIMEKA dan integrasi dengan bank Himbara; (2) Analitika Data—pengembangan dashboard dan pelaporan berbasis data; (3) Sistem Informasi Manajemen—pengembangan modul-modul pendukung operasional BLU; (4) Website—pembaruan dan penguatan website PIP; dan (5) Operasionalisasi BIOS—pengembangan sistem H2H pengiriman data ke platform pelaporan DJPb.

Layanan yang disediakan telah mendukung Program Strategis Nasional melalui pengembangan aplikasi dan integrasi host-to-host (H2H) untuk pengelolaan dana pembiayaan UMKM. Rencana aksi ke depan meliputi: (a) pembuatan Crontab/scheduling untuk service API pengiriman data Keuangan, SDM, dan Layanan agar proses integrasi berjalan otomatis dan terjadwal; dan (b) pembuatan fitur data saldo rekening berdasarkan buku rekening pada aplikasi SIMEKA untuk meningkatkan akurasi pencatatan keuangan BLU.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2025 diselenggarakan dalam satu Kegiatan, yaitu Kegiatan 4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah. Kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam tujuh Klasifikasi Rincian Output (RO) yang mencakup layanan dukungan manajemen, sarana dan prasarana, manajemen SDM, manajemen kinerja, sistem informasi pemerintahan, serta hasil kelolaan dana.

Tabel 26. Pagu Anggaran PIP Tahun 2025 per Rincian Output (dalam Rupiah)

Struktur	Kode	Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir Setelah Revisi (Rp)
Kegiatan	**4713**	**Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah**	**95.640.778.000**	**119.278.406.000**
RO	4713.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	58.923.493.000	70.697.295.000
RO	4713.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.145.000.000	1.145.000.000
RO	4713.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.413.393.000	2.413.393.000
RO	4713.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.072.320.000	1.317.551.000
RO	4713.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	300.000.000	300.000.000
RO	4713.FAM	Hasil Kelolaan Dana	72.354.000	72.354.000
RO	4713.UAM	Hasil Kelolaan Dana (Operasional BLU)	31.714.218.000	43.332.813.000

Pagu anggaran PIP tahun 2025 mengalami revisi dari pagu awal sebesar Rp95.640.778.000 menjadi Rp119.278.406.000 atau meningkat sebesar Rp23.637.628.000 (24,7%). Peningkatan pagu yang cukup signifikan ini terutama terjadi pada dua RO, yaitu:

- RO 4713.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal: meningkat dari Rp58.923.493.000 menjadi Rp70.697.295.000 (+Rp11.773.802.000 atau +20,0%), mencerminkan penambahan alokasi untuk mendukung kebutuhan operasional manajemen internal PIP yang terus berkembang seiring peningkatan skala penyaluran dan kerja sama.
- RO 4713.UAM Hasil Kelolaan Dana (Operasional BLU): meningkat paling besar secara nominal, dari Rp31.714.218.000 menjadi Rp43.332.813.000 (+Rp11.618.595.000 atau +36,6%), mencerminkan kebutuhan tambahan anggaran operasional BLU untuk mendukung ekspansi penyaluran UMi Pro, penambahan penyalur baru, dan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
- RO 4713.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal: meningkat dari Rp1.072.320.000 menjadi Rp1.317.551.000 (+Rp245.231.000 atau +22,9%), untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja PIP.
- RO 4713.EBB, 4713.EBC, 4713.FAB, dan 4713.FAM: tidak mengalami perubahan pagu, menunjukkan stabilitas kebutuhan pada layanan sarana dan prasarana internal, SDM, sistem informasi, dan hasil kelolaan dana reguler.

Secara keseluruhan, realisasi belanja PIP tahun 2025 mencapai Rp21.846.526.788 dengan capaian Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu sebesar 100. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran PIP telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Kementerian Keuangan, mencakup dimensi ketepatan penyerapan, konsistensi antara perencanaan dan realisasi, serta kualitas output yang dihasilkan.

Efisiensi penggunaan anggaran yang sangat signifikan dicerminkan dari biaya per unit layanan yang hanya sebesar Rp10.038,86 per usaha mikro, jauh di bawah Standar Biaya Keluaran (SBK) Khusus yang ditetapkan berdasarkan PMK No. 92 Tahun 2024 sebesar Rp21.574 per usaha mikro—atau efisiensi sebesar 53,5% dari SBK. Hal ini menunjukkan bahwa PIP mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dengan biaya yang jauh lebih efisien dari yang direncanakan, sekaligus menghasilkan realisasi output 2.176.194 usaha mikro yang melampaui target 1.470.000 usaha mikro (148,0%).

Tabel 27. Ringkasan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran PIP Tahun 2025

Uraian	Target / SBK	Realisasi / Capaian
Pagu Anggaran Awal	Rp95.640.778.000	Rp119.278.406.000 (setelah revisi)
Realisasi Belanja	-	Rp21.846.526.788
Output: Usaha Mikro Terlayani	1.470.000 usaha mikro	**2.176.194 usaha mikro (148,0%)**
Biaya per Unit Layanan	SBK: Rp21.574/usaha mikro	**Rp10.038,86/usaha mikro (efisiensi 53,5%)**
Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	**100 (✓Memenuhi Standar)**

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran PIP tahun 2025 tidak hanya memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga mencerminkan prinsip value for money yang x—di mana setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu menghasilkan dampak pelayanan pembiayaan kepada masyarakat yang jauh melebihi standar yang ditetapkan.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tidak hanya berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip efisiensi di berbagai aspek pengelolaan sumber daya. Efisiensi ini diwujudkan melalui optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan aset, dan pengembangan kapasitas organisasi, yang secara signifikan mendukung peningkatan nilai manfaat program pembiayaan UMKM.

1. Efisiensi Anggaran

Indikator efisiensi yang paling menonjol adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan output yang dihasilkan. Dengan realisasi belanja sebesar **Rp21,85 miliar**, PIP berhasil melayani **2.176.194 usaha mikro**, jauh melampaui target awal 1.470.000 usaha mikro. Alhasil, **biaya per unit layanan** yang dikeluarkan hanya sebesar **Rp10.038,86 per usaha mikro**. Angka ini menunjukkan efisiensi yang sangat signifikan, yaitu **53,5% lebih rendah** dari Standar Biaya Keluaran (SBK) Khusus yang ditetapkan dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 sebesar Rp21.574 per usaha mikro. Hal ini membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola PIP mampu memberikan dampak pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (value for money).

2. Efisiensi Proses Bisnis melalui Teknologi Informasi

PIP melakukan transformasi digital yang masif untuk menciptakan efisiensi proses bisnis, mengurangi ketergantungan pada intervensi manual, dan meningkatkan akurasi data. Inisiatif kunci yang mendorong efisiensi ini antara lain:

- **Modernisasi Pengelolaan BLU (IKU 9b-N):** Seluruh program modernisasi pengelolaan BLU berhasil diselesaikan 100% pada tahun 2025. Ini mencakup integrasi data pendapatan dari Aplikasi SIKP UMi ke SIMEKA serta pengembangan integrasi *host-to-host* (H2H) dengan Bank Himbara (Mandiri, BNI, BSI) dan sistem BIOS DJPb. Otomatisasi ini secara drastis mengurangi waktu dan potensi *human error* dalam proses rekonsiliasi data keuangan, pelaporan, dan monitoring, yang sebelumnya membutuhkan banyak sumber daya manual.
- **Digitalisasi Layanan (IKU 7b-N):** Peluncuran aplikasi **UMiConnect** menghadirkan kanal penyaluran pembiayaan baru yang lebih efisien dan terintegrasi, serta membuka peluang kerja sama dengan lebih banyak mitra penyalur tanpa peningkatan beban administrasi yang proporsional.
- **Survei Berbasis Digital (IKU 1c-CP):** Penerapan metode survei elektronik (e-SKPL) untuk mengukur kepuasan layanan menggantikan metode manual. Digitalisasi ini secara signifikan mengurangi biaya dan waktu pelaksanaan survei, serta meningkatkan akurasi dan representativitas data yang diperoleh.

3. Efisiensi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Efisiensi juga dicapai melalui pengelolaan kinerja organisasi yang lebih terstruktur dan program pemberdayaan yang dirancang untuk memberikan efek pengganda (*multiplier effect*).

- **Pengelolaan Kinerja Terintegrasi:** Penerapan prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO) yang dibuktikan dengan capaian IKU 7a-N sebesar 87 (di atas target 85) menciptakan budaya kerja yang selaras dan fokus pada pencapaian strategis. Hal ini memastikan bahwa seluruh sumber daya SDM diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung pada kinerja organisasi.
- **Efektivitas Program Pemberdayaan (IKU 2a-N):** Program pelatihan luring lintas penyalur yang melibatkan 112 SDM dari 57 penyalur menciptakan efek pengganda. Para *Account Officer* (AO) yang terlatih ini kemudian dapat menularkan pengetahuan dan keterampilan kepada ratusan debitur binaan mereka, sehingga menjangkau lebih banyak penerima manfaat tanpa harus menambah secara proporsional sumber daya pelatihan dari PIP. Pendekatan berbasis komunitas seperti Kampung UMi juga lebih efisien dibandingkan pendampingan individual.

4. Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Jaminan

Dalam pengelolaan portofolio pembiayaan, PIP secara aktif mengoptimalkan aset untuk memitigasi risiko dan memastikan keberlanjutan dana bergulir.

- **Mitigasi Risiko Kredit:** Tingkat pengendalian piutang bermasalah (NPL) berhasil dijaga pada level **0,62%**, jauh di bawah batas aman 2%. Upaya ini diperkuat dengan sistem peringatan dini dan koordinasi intensif dengan penyalur, sehingga potensi kerugian dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, PIP berhasil meningkatkan rasio kecukupan jaminan (*coverage*) hingga **108,96%**, salah satunya melalui optimalisasi pengikatan jaminan tambahan berupa aset tetap dari penyalur bermasalah, yang mengamankan posisi PIP sebagai kreditur.
- **Optimalisasi Dana Kelolaan:** PIP berhasil mencapai tingkat penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir sebesar **83,49%**, melampaui target 80%. Tingginya realisasi ini menunjukkan bahwa dana kelolaan Rp10 triliun dikelola secara aktif dan produktif, meminimalkan dana *idle*, dan memaksimalkan dampak program bagi masyarakat.

D. Kinerja Lain-Lain

Sepanjang tahun 2025, Pusat Investasi Pemerintah juga mencatatkan berbagai capaian kinerja lain di luar target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan pengakuan eksternal, penguatan peran strategis, dan komitmen terhadap inovasi berkelanjutan.

1. Inovasi Manajemen dan Pelayanan

PIP terus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran pembiayaan serta pengelolaan risiko. Beberapa inovasi unggulan yang dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 2025 antara lain:

- **UMiConnect:** Aplikasi ini diluncurkan sebagai kanal penyaluran pembiayaan alternatif yang modern dan terintegrasi. Pada tahun 2025, aplikasi ini telah diimplementasikan bersama mitra penyalur KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri (BISMA), membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas di masa mendatang.
- **Aplikasi UMi Innovative Credit Scoring (UMi ICS):** Inovasi ini merupakan sistem penilaian kredit (*credit scoring*) yang menggabungkan data laporan keuangan dan data kredit untuk penilaian pembiayaan yang lebih *prudent*. Pada tahun 2025, PIP berhasil memperluas pemanfaatan UMi ICS melalui Perjanjian Kerja Sama dengan dua mitra strategis, yaitu **Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)** pada 3 November 2025 dan **Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)** pada 17 November 2025. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung analisis kelayakan kredit bagi calon penerima pinjaman di sektor lingkungan hidup serta kelautan dan perikanan. PIP juga telah menetapkan landasan hukum pengembangan inovasi ini melalui Keputusan Direktur Utama PIP Nomor KEP-55/IP/2024 tentang Inovasi Pemberdayaan dan Penilaian Pembiayaan UMi.
- **Dashboard Early Warning System (EWS):** Aplikasi ini dikembangkan untuk mitigasi risiko pembiayaan UMi secara lebih dini, memungkinkan pemantauan portofolio secara real-time dan antisipasi potensi kredit bermasalah. Inovasi ini juga merupakan bagian dari inisiatif pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

2. Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

Kinerja dan inovasi PIP di tingkat nasional mendapatkan pengakuan resmi dari berbagai pihak. Penghargaan yang diterima pada tahun 2025 antara lain:

- **Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian PANRB:** Inovasi **Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi): Layanan Digital Kredit Ultra Mikro (UMi)** berhasil meraih penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa digitalisasi layanan pembiayaan yang dilakukan PIP berdampak luas dan diakui sebagai praktik baik pelayanan publik. Apresiasi ini disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-4078/PB.1/2025.
- **PPID Tingkat II Kategori "Informatif":** Atas komitmen dan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang sangat baik, Pusat Investasi Pemerintah meraih predikat **"Informatif"** dalam Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025. Penghargaan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nomor KEP-16/SJ.6/2025 dengan nilai akhir **96,6**. Piagam penghargaan atas capaian ini secara resmi diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, menegaskan posisi PIP sebagai unit kerja yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik.

3. Menjadi Acuan Benchmarking dan Mitra Strategis

Inovasi dan kapasitas pengelolaan dana yang dimiliki PIP menjadikannya mitra strategis dan acuan bagi institusi lain.

- **Aplikasi UMi ICS sebagai Acuan:** Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPDLH dan LPMUKP untuk penggunaan Aplikasi UMi ICS merupakan bukti bahwa sistem yang dikembangkan PIP telah diakui dan diadopsi oleh lembaga pengelola dana lainnya. Hal ini menempatkan PIP sebagai *role model* dalam pengembangan teknologi untuk penilaian kredit bagi sektor usaha mikro dan segmen khusus. Sebagai mitra, PIP juga dimintai informasi terkait kondisi koperasi calon penyalur, seperti yang tertuang dalam Nota Dinas ND-302/BPDLH/2025 perihal Permohonan Informasi Lembaga Penyalur BPDLH.





BAB 4
PENUTUP



A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tahun 2025 menyajikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, dalam mengelola dana pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya segmen Ultra Mikro (UMi).

Secara umum, kinerja PIP tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan berada pada level tertinggi sepanjang sejarah organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, seluruhnya berhasil mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan (berstatus hijau), dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,96 — merupakan NKO tertinggi yang pernah dicapai PIP sejak berdiri, sekaligus mencerminkan tren kinerja yang positif dan konsisten dalam lima tahun terakhir.

Beberapa capaian utama yang menjadi tonggak kinerja PIP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Perspektif Stakeholder mencapai nilai tertinggi sebesar 118, didorong oleh keberhasilan menjangkau 2.172.146 usaha mikro — melebihi target 1.470.000 (capaian 120%) — sekaligus membuktikan keberhasilan program inklusi keuangan yang diemban PIP dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha yang belum terlayani perbankan formal.
- Perspektif Customer mencapai nilai 115, mencerminkan peningkatan nilai keekonomian debitur sebesar 5,8% (target 3,5%) dan tingkat kepuasan stakeholder sebesar 114 dari target 100, yang menunjukkan kualitas layanan dan pemberdayaan yang semakin dirasakan oleh para penerima manfaat.
- Perspektif Internal Process mencapai nilai 109,47, yang antara lain ditopang oleh keberhasilan pengelolaan portofolio dengan tingkat NPL hanya 0,62% (jauh di bawah batas aman 2%), coverage jaminan pembiayaan sebesar 108,96%, serta realisasi penyaluran yang melampaui target.
- Perspektif Learning and Growth mencapai nilai 100,77, mencerminkan komitmen PIP dalam menjaga kualitas tata kelola organisasi, pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization, serta penerapan inovasi layanan secara penuh.
- Efisiensi penggunaan anggaran yang luar biasa tercermin dari biaya per unit layanan sebesar Rp10.038,86 per usaha mikro, atau 53,5% lebih efisien dari Standar Biaya Keluaran (SBK) yang ditetapkan sebesar Rp21.574 per usaha mikro — membuktikan penerapan prinsip value for money yang tinggi.
- Pengakuan eksternal yang diraih PIP, termasuk penghargaan Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian PANRB atas inovasi SIKP UMi, predikat PPID “Informatif” dengan nilai 96,6 dari Kementerian Keuangan, serta diadopsinya Aplikasi UMi ICS oleh BPDLH dan LPMUKP sebagai mitra strategis, menegaskan posisi PIP sebagai institusi yang inovatif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, PIP telah memenuhi amanat sebagai pengelola dana bergulir Ultra Mikro yang inklusif, prudent, dan berkelanjutan, serta berkontribusi nyata pada agenda prioritas nasional pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

B. Langkah ke Depan

Meskipun kinerja PIP tahun 2025 telah mencapai hasil yang memuaskan, PIP menyadari bahwa terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus direspons secara proaktif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, PIP menetapkan beberapa langkah strategis ke depan sebagai berikut:

1. Perluasan Jangkauan dan Pendalaman Inklusi Keuangan

PIP akan terus mendorong perluasan akses pembiayaan Ultra Mikro kepada kelompok masyarakat yang belum terlayani, termasuk di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Upaya ini akan ditempuh melalui penambahan jumlah penyalur baru yang memenuhi kriteria, pengembangan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan segmen khusus seperti petani, nelayan, dan pelaku ekonomi di sektor lingkungan hidup, serta perluasan implementasi aplikasi UMiConnect sebagai kanal penyaluran modern yang terintegrasi.

2. Penguatan Kualitas Pemberdayaan Debitur UMKM

Untuk meningkatkan nilai keekonomian dan kapasitas usaha debitur, PIP akan memperkuat program pendampingan dan pelatihan yang lebih terstruktur dan terukur. PIP akan mengembangkan model pemberdayaan berbasis komunitas seperti Kampung UMi dan meningkatkan kolaborasi lintas penyalur dalam program pelatihan terpadu. Selain itu, PIP akan mengoptimalkan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan bahwa debitur UMi tidak hanya mendapatkan akses permodalan, tetapi juga kapasitas manajerial dan akses pasar yang lebih baik.

3. Penguatan Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Dana Bergulir

PIP akan terus meningkatkan kapabilitas manajemen risiko untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi pengembangan lebih lanjut Dashboard Early Warning System (EWS) untuk deteksi dini risiko kredit, peningkatan kapasitas analisis kredit melalui perluasan penggunaan Aplikasi UMi ICS, penguatan mekanisme pengikatan jaminan, serta intensifikasi supervisi dan pendampingan kepada penyalur yang menunjukkan indikasi risiko. Upaya ini bertujuan untuk menjaga tingkat NPL di bawah ambang batas aman dan memastikan kesinambungan dana bergulir yang dikelola.

4. Akselerasi Transformasi Digital dan Inovasi Layanan

PIP berkomitmen untuk terus mengakselerasi transformasi digital sebagai fondasi efisiensi dan peningkatan kualitas layanan. Agenda utama yang akan diprioritaskan antara lain perluasan integrasi sistem host-to-host (H2H) dengan lebih banyak mitra perbankan dan lembaga keuangan, peningkatan fungsionalitas aplikasi SIKP UMi sebagai platform pengelolaan data pembiayaan yang komprehensif, serta pengembangan layanan berbasis data analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif. Inovasi yang telah terbukti efektif akan terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya.



5. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Organisasi

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola, PIP akan terus mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO) agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. PIP juga akan memperkuat budaya kepatuhan, integritas, dan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penyempurnaan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja akan terus dilakukan untuk meningkatkan akurasi proyeksi dan kualitas pertanggungjawaban.

6. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

PIP menyadari bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas merupakan aset utama organisasi. Ke depan, PIP akan meningkatkan investasi dalam pengembangan kompetensi pegawai, khususnya di bidang keuangan mikro, analisis risiko, teknologi informasi, dan manajemen BLU. Program pengembangan SDM akan dirancang secara terarah dan terukur untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dengan membangun di atas fondasi kinerja yang kuat di tahun 2025 dan melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut secara konsisten dan terukur, PIP optimis dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas, memberdayakan jutaan pelaku usaha mikro, dan mendukung cita-cita Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Akhirnya, semoga LAKIN ini dapat menjadi salah satu wujud nyata pertanggungjawaban kinerja Pusat Investasi Pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi pada hasil. Kiranya laporan ini mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel kepada pimpinan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maupun seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah.

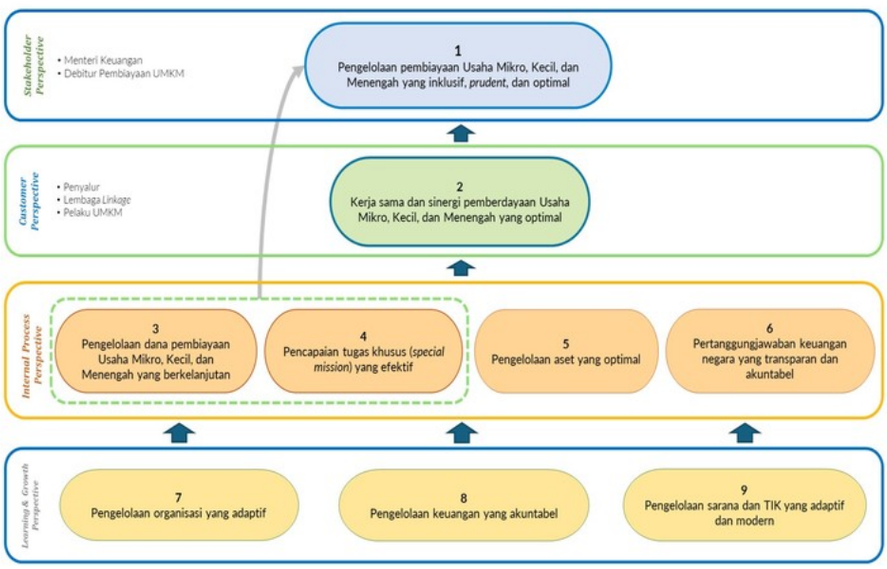
Lebih dari sekadar dokumen pelaporan, LAKIN ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan sumber umpan balik yang bermakna bagi seluruh jajaran organisasi dalam menyusun strategi, menetapkan prioritas, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran. Dengan demikian, capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025 dapat dijadikan pijakan yang kokoh untuk terus mendorong peningkatan kinerja yang lebih berkualitas, lebih berdampak, dan lebih berkelanjutan pada periode yang akan datang demi terwujudnya pembiayaan Ultra Mikro yang inklusif, prudent, dan optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-44/PB/2025
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang inklusif, prudent, dan optimal	1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	100
		1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%
		1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
2	Kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang optimal	2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	100%
		2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%
3	Pengelolaan dana pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berkelanjutan	3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%
		3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100%
		3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	100%
4	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100
		4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5 (skala 5)
5	Pengelolaan aset yang optimal	5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%
		5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%
		5c-N	Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	100%
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (skala 4)
		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%
7	Pengelolaan organisasi yang adaptif	7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85
		7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern	9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Program/Kegiatan 2025	**Anggaran**
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp95,640,778,000
Kegiatan	
1. Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah	Rp95,640,778,000

Jakarta, 5 Februari 2025

Direktur Jenderal Perbendaharaan	Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti	Ismed Saputra

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**Pengelolaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang inklusif, prudent, dan optimal**							
1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2	**Kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang optimal**							
2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	**Pengelolaan dana pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berkelanjutan**							
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	75%	76.5%	76.5%	78%	78%	80%	80%
3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	17.5%	40%	40%	67.5%	67.5%	100%	100%
4	**Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif**							
4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100	100	100	100	100	100	100
4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5 (skala 5)
5	**Pengelolaan aset yang optimal**							
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-N	Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	13.5%	45.5%	45.5%	68.5%	68.5%	100%	100%
6	**Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**							
6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	4	4	4	4	4 (skala 4)
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7	**Pengelolaan organisasi yang adaptif**							
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
8	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**							
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100
9	**Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern**							
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%

Jakarta, 5 Februari 2025

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah

Ditandatangani Secara Elektronik

Ismed Saputra

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 5 Februari 2025

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah



Ditandatangani Secara Elektronik
Ismed Saputra

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ismed Saputra	NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	19710513 199603 1 001	NIP	19680120 199201 1 003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah	JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Pusat Investasi Pemerintah	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang inklusif, prudent, dan optimal	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	100	Penerima Layanan
		Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
2	Kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang optimal	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	100%	Penerima Layanan
		Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan dana pembiayaan	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran	80%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 5 Februari 2025

	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berkelanjutan	dana bergulir		
		Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100%	Proses Bisnis
		Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	100%	Proses Bisnis
4	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	Indeks maturitas tata kelola BLU	100	Proses Bisnis
		Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5 (skala 5)	Proses Bisnis
5	Pengelolaan aset yang optimal	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%	Proses Bisnis
		Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	Proses Bisnis
		Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	100%	Proses Bisnis
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (skala 4)	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi yang adaptif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penerapan inovasi layanan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

		Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	

PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 5 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti

19680120 199201 1 003

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ismed Saputra

19710513 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 5 Februari 2025

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	41 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2a-N	Persentase keberhasilan pendampingan dan pelatihan UMKM	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3a-CP	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	75%	76.5%	76.5%	78%	78%	80%	80%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 5 Februari 2025

3b-CP	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3c-N	Persentase realisasi PNBP layanan utama BLU	17.5%	40%	40%	67.5%	67.5%	100%	100%
4a-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU	100	100	100	100	100	100	100
4b-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5 (skala 5)
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-N	Persentase realisasi nilai penyaluran pembiayaan UMKM kepada debitur	13.5%	45.5%	45.5%	68.5%	68.5%	100%	100%
6a-N	Indeks kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	4	4	4	4	4 (skala 4)
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100

9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%

KONSEKUENSI
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 5 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti

19680120 199201 1 003

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ismed Saputra

19710513 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-44/PB/2026
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

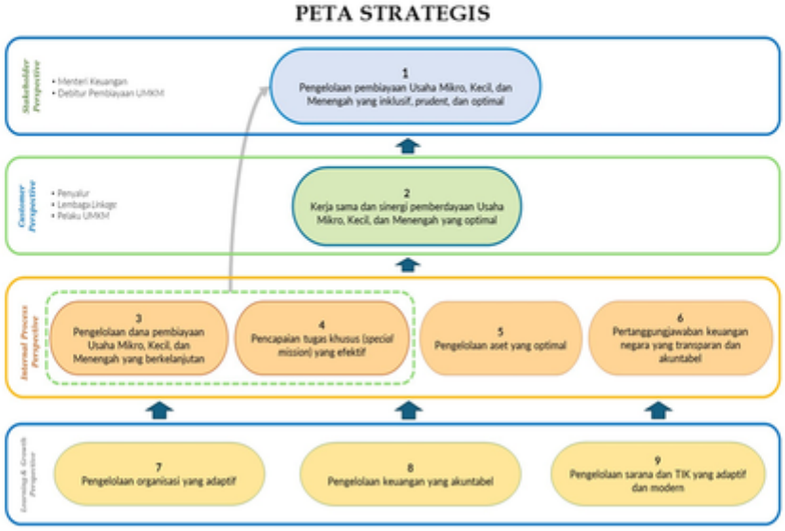
Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

VISI

"Menjadi Pengelola Pembiayaan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM melalui Akses Pembiayaan yang Mudah dan Terjangkau"

PETA STRATEGIS



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Pembiayaan UMKM yang inklusif, Prudent dan Optimal	1a-CP	Persentase debitur yang terfasilitasi pembiayaan UMKM	100%
		1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMKM	100
		1c-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
2	Kerjasama dan sinergi pemberdayaan UMKM yang optimal	2a-N	Persentase Jumlah Debitur UMKM Penerima Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Peluang Usaha	100%
		2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%
3	Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM yang berkelanjutan	3a-CP	Jumlah penyaluran pembiayaan UMKM	80
		3b-N	Persentase Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	100%
4	Pencapaian tugas khusus (spesial Mission) yang efektif	4a-N	Indeks Maturitas BLU	3.25
		4b-N	Indeks Tingkat Perencanaan dan Pengelolaan Rekening BLU	3.5
		4c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)
5	Pengelolaan aset yang optimal	5a-N	Persentase Rasio Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2%
		5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%
6	Pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah	4 (skala 5)
		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%
7	Pengelolaan organisasi yang adaptif	7a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja	100%
		7b-N	Persentase Penerapan Inovasi Layanan	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan	100
9	Pengelolaan Sarana dan TIK yang adaptif dan modern	9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%
		9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Program/Kegiatan 2026	**Anggaran**
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp95,640,778
Kegiatan	
1. Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah	Rp95,640,778

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Perbendaharaan	Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti	Ismed Saputra

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**Pengelolaan Pembiayaan UMKM yang inklusif, Prudent dan Optimal**							
1a-CP	Persentase debitur yang terfasilitasi pembiayaan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMKM	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
2	**Kerjasama dan sinergi pemberdayaan UMKM yang optimal**							
2a-N	Persentase Jumlah Debitur UMKM Penerima Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Peluang Usaha	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	**Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM yang berkelanjutan**							
3a-CP	Jumlah penyaluran pembiayaan UMKM	75	76.5	76.5	78	78	80	80
3b-N	Persentase Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	17.5%	40%	40%	67.5%	67.5%	100%	100%
4	**Pencapaian tugas khusus (spesial Mission) yang efektif**							
4a-N	Indeks Maturitas BLU	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
4b-N	Indeks Tingkat Perencanaan dan Pengelolaan Rekening BLU	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
4c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
5	**Pengelolaan aset yang optimal**							
5a-N	Persentase Rasio Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel**							

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7	**Pengelolaan organisasi yang adaptif**							
7a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-N	Persentase Penerapan Inovasi Layanan	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
8	**Pengelolaan Keuangan yang akuntabel**							
8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan	100	100	100	100	100	100	100
9	**Pengelolaan Sarana dan TIK yang adaptif dan modern**							
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Jakarta, Januari 2026

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah

Ditandatangani Secara Elektronik

Ismed Saputra

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, Januari 2026

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah



Ditandatangani Secara Elektronik
Ismed Saputra

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 3 Februari 2026

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ismed Saputra	NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	19710513 199603 1 001	NIP	19680120 199201 1 003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah	JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Pusat Investasi Pemerintah	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Pembiayaan UMKM yang inklusif, Prudent dan Optimal	Persentase debitur yang terfasilitasi pembiayaan UMKM	100%	Penerima Layanan
		Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMKM	100	Penerima Layanan
		Indeks kepercayaan stakeholders	100	Penerima Layanan
2	Kerjasama dan sinergi pemberdayaan UMKM yang optimal	Persentase Jumlah Debitur UMKM Penerima Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Peluang Usaha	100%	Penerima Layanan
		Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Dana Pembiayaan	Jumlah penyaluran pembiayaan UMKM	80	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 3 Februari 2026

	UMKM yang berkelanjutan	Persentase Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	100%	Proses Bisnis
4	Pencapaian tugas khusus (spesial Mission) yang efektif	Indeks Maturitas BLU	3.25	Proses Bisnis
		Indeks Tingkat Perencanaan dan Pengelolaan Rekening BLU	3.5	Proses Bisnis
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	Proses Bisnis
5	Pengelolaan aset yang optimal	Persentase Rasio Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2%	Proses Bisnis
		Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel	Indeks efektivitas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah	4 (skala 5)	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi yang adaptif	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Penerapan Inovasi Layanan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks kualitas pengelolaan keuangan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan Sarana dan TIK yang adaptif dan modern	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ismed Saputra

19710513 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti

19680120 199201 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 3 Februari 2026

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	46 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase debitur yang terfasilitasi pembiayaan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMKM	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
2a-N	Persentase Jumlah Debitur UMKM Penerima Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Peluang Usaha	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-N	Persentase perluasan kerja sama dan sinergi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3a-CP	Jumlah penyaluran pembiayaan UMKM	75	76.5	76.5	78	78	80	80

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 3 Februari 2026

3b-N	Persentase Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	17.5%	40%	40%	67.5%	67.5%	100%	100%
4a-N	Indeks Maturitas BLU	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
4b-N	Indeks Tingkat Perencanaan dan Pengelolaan Rekening BLU	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
4c-CP	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
5a-N	Persentase Rasio Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5b-N	Persentase coverage jaminan pembiayaan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6a-CP	Indeks efektivitas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-N	Persentase Penerapan Inovasi Layanan	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
8a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan	100	100	100	100	100	100	100
9a-N	Persentase tingkat uptime dan pengelolaan layanan aplikasi Pusat Investasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI									
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ismed Saputra

19710513 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti

19680120 199201 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 3 Februari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF